



**DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI**
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2024

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP 2024 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk Senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, 10 Februari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF



DINAS
PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR
SELATAN

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI



Serapan Anggaran

96,05 %

Pagu : Rp. 18.443.210.960
Realisasi : Rp. 17.714.964.499

Rata-rata Capaian Kinerja



88,83 %

2 dari 6 Indikator
Kinerja Tercapai

**Sasaran 1 Terwujudnya
Pemerintahan yang akuntabel dan
berkinerja**

Indikator : Nilai AKIP Dinas
Perdagangan dan
Transmigrasi **107%**

**Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas
Inovasi Daerah**

Indikator : Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi **95 %**

**Sasaran 3 Meningkatnya
kemandirian Kawasan Transmigrasi**

Indikator : Indeks
Kemandirian Kawasan
Transmigrasi **99,90 %**

**Sasaran 4 Meningkatnya PDRB
Sektor Unggulan**

Indikator 1 Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan **75,69 %**

Indikator 2 Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Perindustrian **54,89 %**

Indikator 3 : Nilai PDRB Sektor Industri
Pengolahan (ADHK)
(Rp. M) **100,2%**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Selama tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di sektor ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar 88,83 % dari target yang ditetapkan di 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja utama. 2 (dua) dari 6(tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dapat dicapai.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6 Kepegawaian	6
1.7 Sarana dan Prasarana Penunjang	11
1.8 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	19
1.9 Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026	24
2.1.1 Visi	24
2.1.2 Misi	25
2.1.3 Tujuan RPJMD	25
2.1.4 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
2.3. Indikator Kinerja Utama dan Target Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	31
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.3 Analisis Hasil Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	33
3.4 Realisasi Anggaran	99
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	101
4.2 Saran	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.3	Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelamin	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024	11
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	26
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	27
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	28
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	30
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	32
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	32
Tabel 3.3	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	33
Tabel 3.4	Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	34
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	35
Tabel 3.7	Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP 2024	38
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	44

Tabel 3.9	Hasil Penilaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	44
Tabel 3.10	Progress Reform (before – after) pelaksanaan Inovasi OPD sasaran startegis 2	45
Tabel 3.11	Perbandingan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	46
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	46
Tabel 3.13	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	49
Tabel 3.14	Hasil Penilaian Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2024*	49
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indeks Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Tahun 2022, 2023 dan 2024	50
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	50
Tabel 3.17	Capaian IKU ke 1 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	55
Tabel 3.18	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (ADHK) tahun 2022, 2023 dan 2024	56
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	57
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	57
Tabel 3.21	Rekapitulasi Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan	63
Tabel 3.22	Data Pasar Kabupaten	63
Tabel 3.23	Data Pasar Serikat	64
Tabel 3.24	Data Pasar Nagari	64
Tabel 3.25	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Pokok dan Barang Penting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	68
Tabel 3.26	Data Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2024	70
Tabel 3.27	Capaian IKU ke 2 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	73
Tabel 3.28	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2022, 2023, 2024	74

Tabel	3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	75
Tabel	3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	75
Tabel	3.31	Alokasi dana DAK Fisik Kementerian Perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	80
Tabel	3.32	Pelaksanaan DAK-Non Fisik PK2SIKM tahun 2024	81
Tabel	3.33	Rekapitulasi Fasilitas Sertifikasi TKDN Tahun 2024	81
Tabel	3.34	Rekapitulasi Fasilitas Legalitas Produk IKM pada tahun 2022-2024	90
Tabel	3.35	Rekapitulasi Legalitas Produk IKM yang terbit pada tahun 2022-2024	91
Tabel	3.36	Rekapitulasi Pelatihan IKM yang Diselenggarakan dengan dana APBN Tahun 2024	91
Tabel	3.37	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022-2024	94
Tabel	3.38	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri	95
Tabel	3.39	Capaian IKU ke 3 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	96
Tabel	3.40	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2022, 2023, 2024	96
Tabel	3.41	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah	97
Tabel	3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	97
Tabel	3.43	Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan	5
Gambar	1.2	Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar	1.3	Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar	3.1	FGD evaluasi Satuan Kawasan Pemukiman (SKP) dengan Kemendes, PDT, Transmigrasi di Silaut	53
Gambar	3.2	Rapat Koordinasi Transmigrasi tahun 2024 di Makasar	53
Gambar	3.3	Cek Fisik Gedung Pusat Bisnis di KTM Lunag Silaut dengan Bapak PJ Bupati	53
Gambar	3.4	Penandatanganan PKS dengan Bank Nagari Terkait Pemanfaatan Gedung Pusat Bisnis di KTM Lunang Silaut	53
Gambar	3.5	Kunjungan ke Kementerian Transmigrasi dengan Bapak Pj Bupati Pessel terkait keberlanjutan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	53
Gambar	3.6	Rapat Koordinasi penyelesaian masalah pertanahan kawasan transmigrasi di dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	53
Gambar	3.7	Kondisi Los Pasar Barung Belantai sebelum Pembangunan	60
Gambar	3.8	Kondisi Los Pasar Barung Belantai saat Pembangunan	60
Gambar	3.9	Kondisi Los Pasar Barung Belantai setelah Pembangunan	61
Gambar	3.10	Serah Terima Hibah Pasar Lunang	62
Gambar	3.11	Rapat SCM Pembangunan Pasar Painan di BPPW Sumatera Barat	62
Gambar	3.12	<i>Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Laporan Harian harga Bahan Pokok</i>	66
Gambar	3.13	Rapat Penanggulangan Inflasi	66
Gambar	3.14	Rakor Pengendalian Inflasi Daerah	67
Gambar	3.15	Operasi Pasar di Kecamatan IV Jurai	70
Gambar	3.16	Operasi Pasar di Kecamatan Ranah Pesisir	71
Gambar	3.17	Operasi Pasar di Kecamatan Koto XI Tarusan	71
Gambar	3.18	Kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP di Pasar, Perkebunan, Puskesmas dan Posyandu	72
Gambar	3.19	Pameran Inacraft tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC)	77

Gambar	3.20	Pameran Inacraft tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) (lanjutan)	78
Gambar	3.21	HUT Dekranas ke 44 di Kota Solo	78
Gambar	3.22	Dokumentasi Pembangunan Sentra IKM Gambir di Kecamatan Sutera	80
Gambar	3.23	Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2024	92
Gambar	3.24	Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2023 (lanjutan)	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

1.4 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

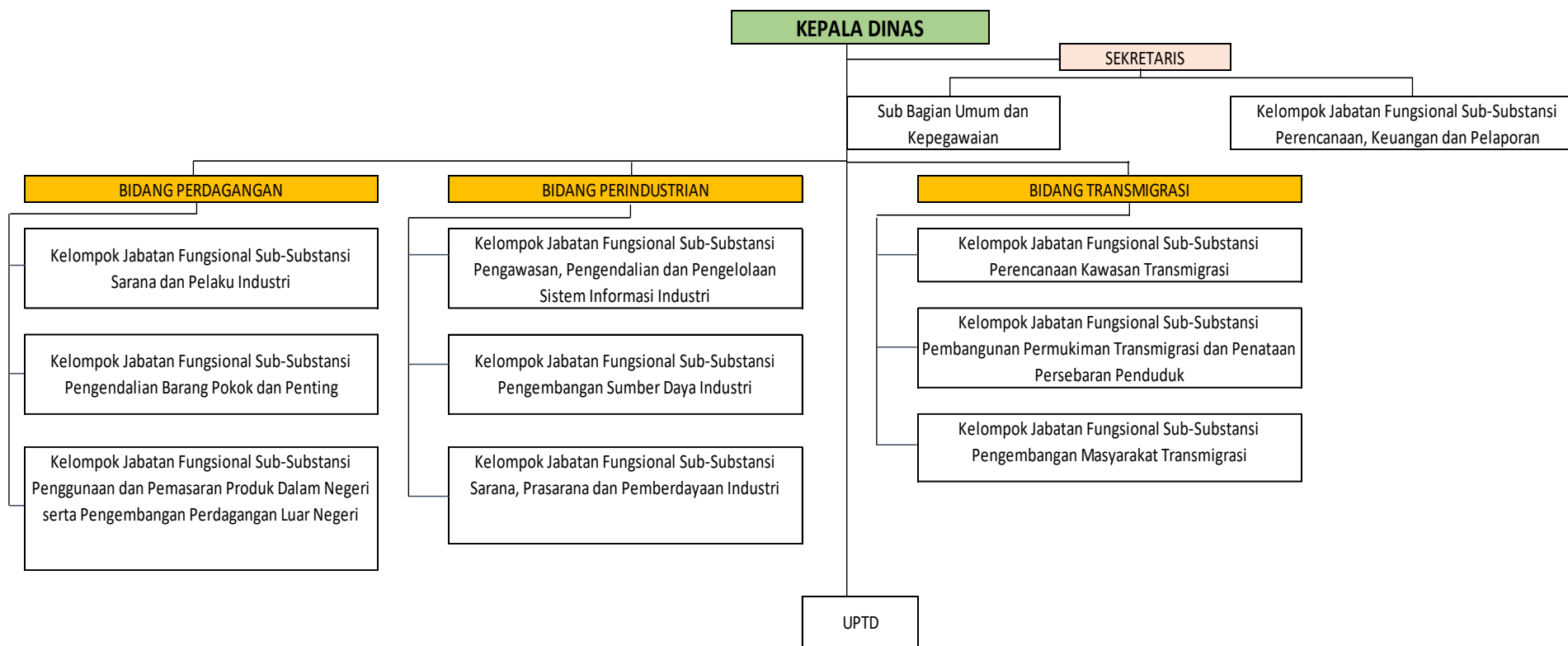
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

1.6 Kepegawaian

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didukung oleh 29 (Dua Puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 berdasarkan Golongan

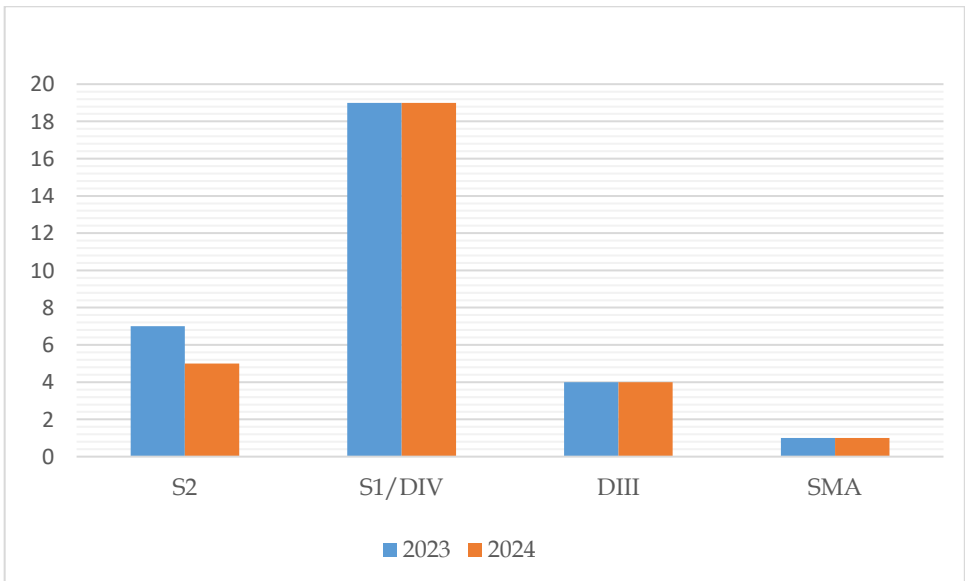
Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
4	23	2	-	29

Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2024

Tabel 1.2
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1/DIV	DIII	SMA	JUMLAH
2023	7	19	4	1	31
2024	5	19	4	1	29

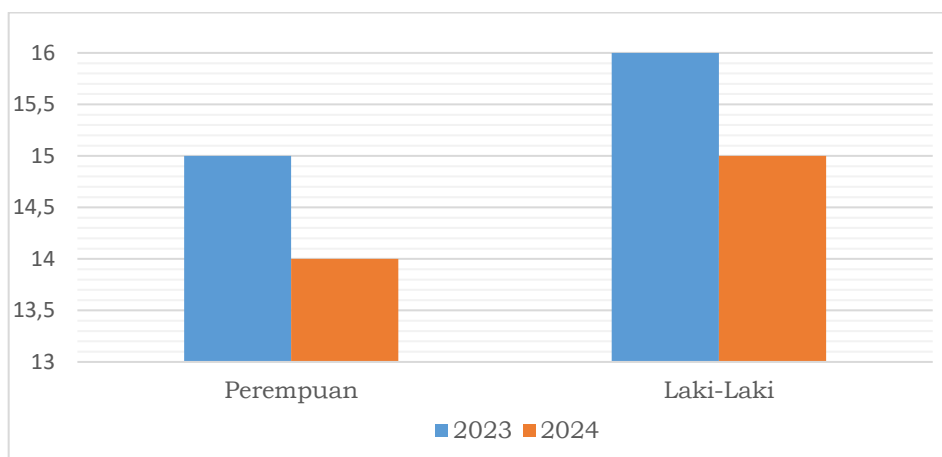
Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2024



Gambar 1.2
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
2023	31	15	16
2024	29	14	15



Gambar 1.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tupoksi

Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang kepala UPT, 1 (satu) orang kepala sub bagian kepegawaian pada UPT dan 11 (sebelas) orang fungsional tertentu.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;

- b. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- f. Mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan membawahi :

- 1. Sekretariat;
- 2. Bidang Perdagangan;
- 3. Bidang Perindustrian;
- 4. Bidang Transmigrasi;
- 5. UPTD

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, organisasi, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Dalam menjalankan tugas, sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip,
- b. dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;

- d. Koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Pelaksanaan Urusan Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting;
- c. Pelaksanaan Urusan Optimalisasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- d. Pelaksanaan Urusan Standarisasi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan pengembangan Sumber Daya Industri
- b. Pelaksanaan Urusan penyediaan Sarana dan Prasarana Industri
- c. Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- d. Pelaksanaan urusan Pengawasan, Pengendalian Perizinan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Transmigrasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Transmigrasi melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Pelaksanaan Urusan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- c. Pelaksanaan Urusan Pengembangan Infrastruktur, SDM dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dibentuk UPTD. Untuk membantu sebagian tugas Perdagangan yang menyangkut kemetrolagian dan pelayanan konsumen maka dibentuk UPTD Kemetrolagian dan Standarisasi.

Tugas dan Fungsi UPTD Kemetrolagian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri, yaitu Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi Pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

1.7 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01.		TANAH	37
		01.	TANAH	37
		01.11.	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	37
		01.11.01.	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1
		01.11.01.02.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1
		01.11.02.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	23
		01.11.02.01.	Tanah Bangunan Pasar	21
		01.11.02.14.	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan Lainnya	2
		01.11.04.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	12
		01.11.04.01.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11
		01.11.04.25.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1
		01.11.08.	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1
		01.11.08.01.	Tanah Jalan	1
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	1.558
		02.	ALAT -ALAT BESAR	2
		02.01.	ALAT -ALAT BESAR DARAT	2
		02.01.10.	Alat Pengangkat	2
		02.01.10.05.	Forklift	2
		03.	ALAT ALAT ANGKUTAN	40
		03.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	14
		03.01.02.	Kendaraan Bermotor Penumpang	3
		03.01.02.03.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	3

1	2	3	4	5
		03.01.04.	Kendaraan Bermotor Khusus	4
		03.01.04.23.	Mobil Dapur Lapangan	4
		03.01.05.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
		03.01.05.01.	Sepeda Motor	7
		03.02.	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	26
		03.02.01.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	26
		03.02.01.01.	Gerobak Tarik	8
		03.02.01.02.	Gerobak Dorong	10
		03.02.01.05.	Becak	8
		04.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	12
		04.01.	Alat Bengkel Bermesin	6
		04.01.04.	Perkakas Bengkel Service	6
		04.01.04.08.	Alat Bengkel (Workshop)	6
		04.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
		04.02.07.	Perkakas Bengkel Kerja	4
		04.02.07.03.	Bor	4
		04.03.	ALAT UKUR	2
		04.03.10.	Alat Timbangan/Blora	2
		04.03.10.40.	Timbangan Tera Ulang	2
		05.	ALAT PERTANIAN	8
		05.01.	ALAT PENGOLAHAN	8
		05.01.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1
		05.01.01.12.	Chain Saw	1
		05.01.04.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2
		05.01.04.04.	Rak-rak penyimpan	2
		05.01.07.	Alat Pasca Panen	5
		05.01.07.03.	Alat Penggilingan - Padi	2
		05.01.07.04.	Alat Pencacah Hijauan	3
		06.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.429
		06.01.	ALAT KANTOR	363
		06.01.01.	Mesin Tik	3
		06.01.01.01.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
		06.01.04.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	209
		06.01.04.02.	Rak Besi/Metal	72
		06.01.04.03.	Rak Kayu	14

1	2	3	4	5
		06.01.04.04.	Filling Besi/Metal	23
		06.01.04.09.	Lemari Penyimpanan	92
		06.01.04.10.	Peti Uang	1
		06.01.04.12.	Lemari Kaca	7
		06.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA	43
		06.01.05.06.	Papan Nama Instansi	2
		06.01.05.150	Trolly Barang	8
		06.01.05.17.	Mesin Absensi	2
		06.01.05.37.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
		06.01.05.42.	Meja Biro	4
		06.01.05.44.	Generator Set	4
		06.01.05.46.	Stabilizer	6
		06.01.05.50.	Katrol Elektrik	2
		06.01.05.68.	Papan Informasi	8
		06.01.06.	ALAT KANTOR KEDOKTERAN/ RUMAH SAKIT	108
		06.01.06.05.	Peralatan Kantor Lainnya	108
		06.02.	ALAT RUMAH TANGGA	883
		06.02.01.	Meubilair	562
		06.02.01.01.	Lemari Kayu	37
		06.02.01.02.	Rak Kayu	34
		06.02.01.04.	Meja Kayu/Rotan	18
		06.02.01.05.	Kursi Besi / Metal	4
		06.02.01.10.	Meja Rapat	19
		06.02.01.12.	Meja Makan	10
		06.02.01.16.	Meja Tik	2
		06.02.01.17.	Meja Resepsion	6
		06.02.01.18.	Meja Kerja Staf	12
		06.02.01.19.	Meja Panjang	2
		06.02.01.27.	Kursi Rapat	10
		06.02.01.28.	Kursi Tamu	63
		06.02.01.30.	Kursi Putar	24
		06.02.01.31.	Kursi Biasa	120
		06.02.01.34.	Kursi Lipat	31
		06.02.01.48.	Meja 1/2 Biro	72
		06.02.01.49.	Sofa	10
		06.02.01.65.	Locker	8

1	2	3	4	5
		06.02.01.77.	Kursi Kerja Staf	70
		06.02.01.78.	kulkas	6
		06.02.01.81.	Kursi Tunggu	4
		06.02.04.	Alat Pendingin	56
		06.02.04.03.	AC Unit	39
		06.02.04.04.	AC Split	10
		06.02.04.06.	Kipas Angin	7
		06.02.05.	Alat Dapur	80
		06.02.05.02.	Kompor Gas	40
		06.02.05.09.	Tabung Gas	40
		06.02.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	181
		06.02.06.03.	Televisi	15
		06.02.06.112	Baliho	2
		06.02.06.12.	Wireless	1
		06.02.06.129	Freezer	52
		06.02.06.13.	Tong Sampah	22
		06.02.06.153	Container Sampah	2
		06.02.06.20.	Stabilisator	14
		06.02.06.21.	Camera Video	26
		06.02.06.26.	Timbangan Barang	6
		06.02.06.37.	Tangga Alumunium	4
		06.02.06.49.	Handy Cam	2
		06.02.06.53.	Gorden	5
		06.02.06.57.	Asbak	6
		06.02.06.59.	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	1
		06.02.06.63.	Tangki Air	5
		06.02.06.65.	Lemari Es	2
		06.02.06.86.	Wajan	12
		06.02.06.88.	Rak Bambu	4
		06.02.07.	Alat Pemadam Kebakaran dan SAR	4
		06.02.07.01.	Alat Pemadam/Portable	4
		06.03.	KOMPUTER	111
		06.03.02.	Personal Komputer	37
		06.03.02.01.	P.C. Unit	1
		06.03.02.02.	Lap Top	34

1	2	3	4	5
		06.03.02.03.	Note Book	2
		06.03.04.	Peralatan Mini Komputer	42
		06.03.04.08.	Printer	4
		06.03.04.11.	Computer Compatible	20
		06.03.04.13.	Hard Disk Eksternal	18
		06.03.05.	Peralatan Personal Komputer	31
		06.03.05.03.	Printer	31
		06.03.06.	Peralatan Jaringan	1
		06.03.06.04.	Modem	1
		06.04.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	72
		06.04.01.	Meja Kerja Pejabat	31
		06.04.01.04.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5
		06.04.01.05.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12
		06.04.01.06.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14
		06.04.03.	Kursi Kerja Pejabat	41
		06.04.03.04.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	16
		06.04.03.05.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
		06.04.03.06.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19
		06.04.03.08.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2
		07.	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	18
		07.01.	ALAT STUDIO	13
		07.01.01.	Peralatan Studio Visual	9
		07.01.01.03.	Proyektor + Attachment	4
		07.01.01.92.	Camera Digital	5
		07.01.06.	Peralatan Pemetaan Ukur	4
		07.01.06.32.	Timbangan Gantung	4
		07.02.	ALAT KOMUNIKASI	5
		07.02.01.	Alat Komunikasi Telephone	5
		07.02.01.20.	Faximile	5
		09.	ALAT LABORATORIUM	49
		09.01.	UNIT UNIT LABORATORIUM	46
		09.01.01.	Alat Laboratorium Kimia Air	4
		09.01.01.06.	Timbangan Elektronik	4
		09.01.10.	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	10
		09.01.10.53.	Sepatu (International Safety Tester)	10
		09.01.11.	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	1

1	2	3	4	5
		09.01.11.34.	Hot Water Hosty Type 50	1
		09.01.12.	Alat Laboratorium Umum	2
		09.01.12.23.	Timbangan	2
		09.01.13.	Alat Laboratorium Umum A	2
		09.01.13.03.	Hidrolic Hand Press	2
		09.01.15.	Alat Laboratorium Microbiologi	1
		09.01.15.16.	Demineralizer	1
		09.01.16.	Alat Laboratorium Kimia	18
		09.01.16.30.	Destilator	18
		09.01.22.	Alat Laboratorium Makanan	1
		09.01.22.25.	mixer	1
		09.01.46.	Alat Laboratorium Pertanian	4
		09.01.46.36.	Crane	2
		09.01.46.90.	Grinder	2
		09.01.58.	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	3
		09.01.58.19.	Packaging Machine	2
		09.01.58.22.	Homogenizer	1
		09.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1
		09.07.04.	Laboratorium Lingkungan	1
		09.07.04.14.	mesin pencacah	1
		09.11.	ALAT LABOR BENGKEL/MESIN	2
		09.11.01.	Alat Labor Mesin	2
		09.11.01.27.	Kotak/Kunci Set Besar	2
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	301
		11.	BANGUNAN GEDUNG	301
		11.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	231
		11.01.01.	Bangunan Gedung Kantor	10
		11.01.01.01.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5
		11.01.01.04.	Pagar Gedung Kantor	5
		11.01.02.	Bangunan Gudang	6
		11.01.02.01.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6
		11.01.08.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4
		11.01.08.01.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	4
		11.01.09.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2
		11.01.09.04.	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2

1	2	3	4	5
		11.01.11.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2
		11.01.11.03.	Bangunan lain-lain	2
		11.01.12.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	161
		11.01.12.01.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	122
		11.01.12.03.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat	4
		11.01.12.04.	Toilet/WC Umum Pasar	5
		11.01.12.05.	Bangunan Los Pertokoan/Pasar	24
		11.01.12.06.	Bangunan Pelataran Pertokoan/Pasar	6
		11.01.16.	Bangunan Gedung Pabrik	1
		11.01.16.01.	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1
		11.01.19.	Bangunan Gedung Perpustakaan	4
		11.01.19.01.	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	4
		11.01.27.	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	38
		11.01.27.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	38
		11.01.33.	Bangunan Parkir	3
		11.01.33.01.	Bangunan Parkir Permanen	3
		11.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
		11.02.02.	Rumah Dinas Golongan II	1
		11.02.02.07.	Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1
		11.05.	BANGUNAN LAINNYA	69
		11.05.09.	Bangunan Taman	3
		11.05.12.	Bangunan MCK	6
		11.05.14.	Bangunan Pagar Paddock	2
		11.05.15.	Bangunan Pos Jaga	7
		11.05.27.	Halaman/Pelataran Parkir	8
		11.05.29.	Bangunan Los Pasar	34
		11.05.30.	Pelataran Pasar	3
		11.05.31.	Halaman Lingkungan Perkantoran	4
		11.05.32.	Rumah Batik	2
4	04		JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	65
		13.	JALAN DAN JEMBATAN	33
		13.01.	JALAN	27
		13.01.03.	Jalan Kabupaten/Kota	3
		13.01.03.05.	Jalan Kabupaten Kolektor	1
		13.01.03.06.	Jalan Kabupaten Lokal	2

1	2	3	4	5
		13.01.04.	Jalan Desa	20
		13.01.04.01.	Jalan Desa	20
		13.01.05.	Jalan Khusus	4
		13.01.05.01.	JalanKhusus	
		13.01.05.04.	Jalan Khusus Komplek	4
		13.02.	JEMBATAN	6
		13.02.04.	Jembatan Desa	6
		13.02.04.01.	Jembatan Beton	4
		13.02.04.06.	Jembatan pada Jalan Poros Desa	2
		14.	BANGUNAN AIR/ IRIGASI	19
		14.01.	Bangunan Air Irigasi	2
		14.01.04.	Bangunan Pembuang Irigasi	2
		14.01.04.02.	Saluran Sekunder Pembuang	2
		14.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANG	4
		14.04.04.	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4
		14.04.04.02.	Saluran Drainase	4
		14.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	2
		14.06.05.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2
		14.06.05.09.	Sumur Bor	2
		14.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	11
		14.07.01.	BANGUNAN AIR KOTOR	11
		14.07.01.02.	Saluran Pengumpul Air Kotor	11
		15.	INSTALASI	8
		15.01.	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	3
		15.01.05.	Instalasi Air Barsih/Air Baku Lainnya	3
		15.01.05.01.	Sistim Pengolahan Air Sederhana (Sipas)	1
		15.01.05.04.	Sumur Gali (SGL)	2
		15.02.	INSTALASI AIR KOTOR	2
		15.02.02.	Instalasi Air Buangan Industri	2
		15.02.02.03.	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar	2
		15.12.	INSTALASI LAINNYA	3
		15.12.02.	Instalasi Lampu	1
		15.12.04.	Instalasi Jaringan Elektronik	2
		16.	JARINGAN	5
		16.02.	JARINGAN LISTRIK	5

1	2	3	4	5
		16.02.03.	Jaringan Listrik	5
		16.02.03.08.	Jaringan Listrik Kantor/Rumah	5
5	05		ASET TETAP LAINNYA	75
		17.	BUKU PERPUSTAKAAN	75
		17.01.	BUKU	70
		17.01.01.	Umum	25
		17.01.01.11.	Buku Peraturan Perundang-undangan	25
		17.01.07.	Ilmu Pengetahuan Praktis	45
		17.01.07.08.	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	5
		17.01.07.10.	Lain-lain.	40
		17.02.	TERBITAN BERKALA	5
		17.02.01.	Terbitan Berkala	5
		17.02.01.03.	Lain-lain	5
6	06		KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	38
		20.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	38
		20.01.	KONSTRUK	38
		20.01.01.	KONSTRUKSI1	38
		20.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	38
7	07		ASET LAINNYA	
		00.	ASET LAIN-LAIN	
		01.	ASET TAK BERWUJUD	
TOTAL				2,074

1.8 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset

pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain :

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi : Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
- d. Inflasi yang menyentuh semua lini sektor usaha

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
- f. Mendorong promosi dan jejaring pemasaran serta penggunaan produk-produk lokal melalui partisipasi aktif dalam program/ kebijakan nasional mengenai TKDN dan P3DN
- g. Upaya penanggulangan inflasi dengan melalui kegiatan operasi pasar (penanggulangan jangka pendek), pemantauan harga dan pengendalian ketersediaan bahan pokok (penanggulangan jangka menengah dan panjang)

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,
3. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.

3. Kemandirian Lembaga dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain : Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut.
- b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
3. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/ infrastruktur di kawasan transmigrasi

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi saat ini masih belum optimal. Tahun 2023 penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah A (87,97). Nilai ini naik 6 (enam) poin dibanding tahun sebelumnya. Namun di beberapa komponen masih perlu ditingkatkan karena masih cukup jauh dari bobot/ target penilaian. Kedepannya peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja masih perlu dilakukan. Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi berupa aplikasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pun sangat diperlukan.

5. Optimalisasi Penerapan Inovasi dalam upaya Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Inovasi yang dikatakan berhasil adalah inovasi yang penciptaan dan pelaksanaan proses/ metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Namun, permasalahan yang muncul adalah keberlangsungan inovasi yang dibuat. Beberapa inovasi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, tidak bertahan lama dan hanya bertahan beberapa bulan atau tahun. Untuk itu diperlukan komitmen bersama yang melibatkan seluruh agen inovasi agar inovasi tetap hidup dan mencapai perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

1.9 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi

kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud
 - b. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan, sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat,
Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|--|
| Sejahtera | : | Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. |
| Maju : | : | Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan. |
| Bermatabat | : | Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). |
| Akuntabel | | Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja |

atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2 Misi

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional ” dilaksanakan melalui 6 (enam) misi. Berdasarkan 6 (enam) misi Kepala Daerah terdapat 3 (tiga) misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yakni :

- Misi ke 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- Misi ke 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- Misi ke 3 : **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**

2.1.3 Tujuan RPJMD

Berdasarkan 3 (tiga) misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, maka tujuan RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

2.1.4 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

Berdasarkan misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahun ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan									
1.1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan	A (80)	A (80)	A (82)	AA	AA	AA
1.2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan			100	100	100	100
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat									
2.1	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Tanpa Satuan	41,10	68,7	72,08	76,61	78,51	80,41
Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah									
3.1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	2,3	3,8	5,7	6,5	7,2	8,38
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	1,0	3,2	4.5	5,3	6,7	7,8
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. Miliar	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87

2.2 Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang disusun setiap tahun pada periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 memuat program prioritas berserta anggaran dan merupakan dokumen teknis dan operasional pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 merupakan Rencana Kinerja yang nantinya akan diperjanjikan oleh Kepala Dinas melalui Perjanjian Kinerja, yang diturunkan dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	4,5%
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 758 M

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA PERHITUNGAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	
3	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hasil kerjasama dengan lembaga/ universitas yang ditunjuk	Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Identifikasi Penentuan Target Kinerja

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja yang secara spesifik akan dicapai pada periode tertentu. Target kinerja pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi ini merupakan nilai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, yang telah disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026.

Target kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi ditetapkan berdasarkan proyeksi dari Kementerian berwenang yang melakukan penilaian serta proyeksi mandiri Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dengan menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), sebagai berikut :

- a. *Specific* : Target kinerja harus bersifat spesifik, artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin diraih
- b. *Measurable* : Target kinerja harus terukur, artinya target kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal
- c. *Achievable* : Target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia, sebagai perbandingan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat melakukan peramalan/ proyeksi kedepan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Relevant* : Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai
- e. *Time-Bound* : Sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Racionalisasi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024.

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,50 %
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	4,50 %
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 758 M

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah/Kabupaten	4.660.263.532
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	884.675.048
3	Program Stabiisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	29.499.610
4	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	283.356.097
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	34.007.630
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	12.435.409.155
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26.000.000
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	89.999.888
	Jumlah	Rp 18.443.210.960

Screenshot Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat pada lampiran 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya;

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1		2		3	4	5
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1	Nilai AKIP Dinas Peradgangan dan Transmigrasi	A (82)	A (87,97)	107,28
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	95	95,00
3.	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	3.1	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61	76,53*	99,90
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	4.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,50 %	4,92 % *	75,69
		4.2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	4,50 %	2,47 % *	54,89
		4.3.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 758 M	Rp. 759,55 M *	100,20
Rata-Rata Capaian (%)						88,83

*Data Tahun 2023

3.3 Analisis Hasil Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan yang selaras dengan tujuan dan sasaran startegis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Indikator : HASIL PENILAIAN AKIP DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI DARI INSPEKTORAT

Definisi Operasional :

Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Indikator		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A (82)	A (87,97)*	107,28

Penilaian AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Instansi pengawas internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai ini disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Kinerja (LKj) pada tahun yang dievaluasi.

Nilai realisasi yang ditampilkan merupakan nilai capaian sementara, yang merupakan hasil penilaian terhadap AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2024 :

Tabel 3.4
Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	81,96	87,97	87,97*

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.	Perencanaan Kinerja	: 27,36
2.	Pengukuran Kinerja	: 22,33
3.	Pelaporan Kinerja	: 14,03
4.	Evaluasi Internal	: 24,25
	Nilai Hasil Evaluasi	: 87,97

Hasil dari perhitungan rasio tersebut kemudian diindeksasi dengan klasifikasi penilaian pada table 3.1

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berada pada kategori A (Memuaskan : Terdapat gambaran bahwa Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ pengawas/ subkoordinator)

Dari hasil Penilaian terjadi **kenaikan Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebesar 6,01 poin atau sekitar 7,33 %** dari tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A (87,97)*	AA (90)	97,74	Akan Tercapai (Sama atau lebih dari 100%)

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan nilai capaian indikator nilai AKIP dinas perdagangan dan transmigrasi Kabupaten pesisir selatan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi sumatera barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Sumbar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar	Kementerian Perindustrian	Kementerian Transmigrasi	Kemendes, PDT, Trans
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan	87,97*	78,38 *	78,40 *	BB**	BB**	B**

Catatan : *Data tahun 2023, ** Data tahun 2022

Sumber : 1. LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov Sumatera Barat Tahun 2024

2. LHE AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumatera Barat Tahun 2024

3. <http://1data.menpan.go.id>

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- Terdapat beberapa komponen penilaian dengan hasil yang berhasil/ naik dan beberapa yang gagal/ turun. Berikut diantara penyebab keberhasilan dan kegagalan pada hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 :
 - a. Keterlibatan seluruh unsur dinas belum terkoordinir dengan baik. Dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan dan penyampaian data dan informasi capaian kinerja setiap level Dinas mulai dari kinerja eselon 3 hingga kinerja operasional (eselon 4/ subkoordinator)
 - b. Perencanaan kinerja operasional belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat belum lengkapnya SOP (*Standar Operasional Procedure*) Program dan Kegiatan Dinas
 - c. Belum adanya *reward* dan *punishment* terhadap hasil pengukuran capaian kinerja setiap level satuan kerja
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja.
- Untuk kedepannya, Dinas perdagangan dan transmigrasi akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi ke-4 komponen penilai AKIP dengan melibatkan seluruh unsur pada Dinas, melakukan evaluasi dan berkomitmen melaksanakan tindak lanjut yang telah dirumuskan.

F. Tindak Lanjut terhadap Penilaian AKIP Tahun 2023

Tindak lanjut terhadap penilaian AKIP tahun 2023 yang telah dilakukan yaitu :

1. Perencanaan Kinerja :
 - a. Rasionalisasi Target pada RKT dan Perjanjian Kinerja 2024
 - b. Agenda rapat evaluasi dan monitoring yang lebih terorganisir dari tahun sebelumnya. Melalui subkegiatan evaluasi perangkat daerah, Kepala dinas dan sekretariat akan lebih dapat dan optimal dalam mengontrol realisasi/ capaian indikator di masing-masing bidang sesuai dengan target yang ditetapkan
 - c. Disusunnya Renja 2024 didasarkan atas efektivitas pelaksanaan kegiatan
 - d. Terlaksananya forum Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka menjaring masukan dan menyelaraskan program dan kegiatan dengan OPD lain dan stakeholder yang bersinggungan dengan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
2. Pengukuran Kinerja

- a. Disusunnya Rencana Aksi per sub kegiatan, sehingga pimpinan dapat memantau perencanaan dan realisasi kinerja hingga ke tingkat operasional
 - b. Disusunnya kuisioner penilaian lingkungan penilaian intern (SPIP) yang mana salah satu komponen yang dinilai adalah Komitmen terhadap kompetensi yang kemudian dirincikan : apakah telah terdapat Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan
 - c. Koordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Pessel terkait penempatan/ penghapusan jabatan struktural dan fungsional
3. Pelaporan Kinerja
- a. Penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) telah didasarkan atas Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja (AKIP) tahun 2024 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
 - c. Sosialisasi Informasi Kinerja pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi per Triwulan
 - b. Dianggarkannya kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada DPA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024, sebagai bentuk keseriusan Dinas perdagangan dan Transmigrasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas

Berikut Tabel tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2023 :

Tabel 3.7
Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Progres Pelaksanaan	Koordinator	Eviden*
1	Agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik. Tiap-tiap indikator kinerja, realisasi minimal sama dengan target yang telah ditetapkan	Adanya kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada DPA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi TA 2024, diharapkan monitoring terhadap evaluasi masing-masing triwulan lebih terorganisir dan terlapor dengan baik	1 (satu) dokumen DPA TA 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telah Selesai	Sekretaris	DPA TA 2024
		Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Rasionalisasi Target pada RKT dan Perjanjian Kinerja 2024	1 (satu) dokumen RKT 2024 dan 1 (satu) dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	RKT 2024 , PK 2024
2	Agar perbaikan/ penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dapat memberikan alternatif dari penilaian atas seluruh aksi	Penyusunan Renja 2024 didasarkan atas efektivitas pelaksanaan kegiatan	1 (satu) dokumen Renja 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	Renja 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Agar perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja menunjukkan perbaikan setiap bulannya	Penyusunan rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan	4 (empat) dokumen rencana aksi dan 4 (empat) dokumen capaian kinerja	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Dokumen Rencana Aksi dan Capaian Kinerja TW I- TW IV
4	Agar setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan lebih dari 90%. Lakukan penyebaran kuisioner ke bidang-bidang/ unit-unit untuk mendalami tingkat pemahaman, kepedulian dan komitmen	Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Penyusunan dan penyebaran kuisioner kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1 (satu) dokumen kuisioner	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	-
5	Agar setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah dilaksanakan. Lakukan penyebaran kuisioner ke bidang-bidang/ unit-unit untuk mendalami tingkat pemahaman, kepedulian dan komitmen	Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Penyusunan dan penyebaran kuisioner pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1 (satu) dokumen kuisioner	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	-
6	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Rencana Aksi disusun per sub kegiatan, sehingga pimpinan dapat memantau perencanaan dan realisasi kinerja hingga ke tingkat operasional	4 (empat) dokumen rencana aksi	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	Dokumen Rencana Aksi TW I-TW IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Penyebaran kuisisioner penilaian lingkungan penilaian intern (SPIP) yang mana salah satu komponen yang dinilai adalah Komitmen terhadap kompetensi yang kemudian dirincikan : apakah telah terdapat Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1 (satu) dokumen kuisisioner penilaian lingkungan penilaian intern	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	Dokumen Kuisisioner dan Rekapitulasi Kuisisioner SPIP
		Koordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Pessel terkait penempatan/ penghapusan jabatan struktural dan fungsional	2 (dua) kali koordinasi	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	
8	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) telah didasarkan atas Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja	Dokumen SKP ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi melalui website e-kinerja BKN	4 (empat) dokumen SKP	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Dokumen SKP TW I-TW IV
9	Agar laporan kinerja menginformasikan apakah pada LKj telah ditemukan kecukupan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya info tentang efisiensi yang telah dilakukan	Menyusun Laporan Kinerja (AKIP) tahun 2024 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024	1 (satu) dokumen	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan cara lakukan wawancara terhadap pegawai, sejauhmana mengetahui informasi kinerja yang ada dalam LKj sehingga menghasilkan bukti hasil wawancara/ kuesioner kepedulian pegawai	Penyusunan dan penyebaran kuisiner kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1 (satu) dokumen kuisiner	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	-
		Sosialisasi Informasi Kinerja pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	2 (dua) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	
11	Agar pemantauan Capaian kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan cara melakukan analisis apakah pemantauan capaian kinerja internal telah menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong, factor hambatan dan rekomendasi	Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi per Triwulan	4 (empat) laporan	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	
		Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	
		Monev Kegiatan ke Lapangan	4 (empat) kali kunjungan	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	

Screenshot Surat tindak lanjut LHE AKIP terdapat pada Lampiran 2.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pada pencapaian nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 terdapat efisiensi pada realisasi anggaran. Dimana pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/ kota yang merupakan program yang mendukung indikator ini realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.262.776.134 dari pagu anggaran Rp. 4.660.263.532,- atau 91,47%. Dengan demikian terjadi efisiensi sebesar 8,53 %.
- Efisiensi anggaran tidak mengurangi capaian kinerja, dimana dengan realisasi anggaran dibawah pagu anggaran, capaian kinerja nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 tetap tinggi yaitu 107 %
- Efisiensi sumber daya material seperti perawatan mobilier penunjang pekerjaan operasional tidak membebankan anggaran, begitu pun dengan penggunaan kertas bekas/ rejected untuk mencetak beberapa catatan/laporan dinas yang bersifat internal juga dilakukan dalam rangka efisiensi sumber daya ATK kantor
- Efisiensi sumber daya personel juga dilakukan di sekretariat Dinas, dimana saat ini personel sekretariat hanya berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris 1 (satu) orang kasubag umum dan kepegawaian yang membawahi 3 (tiga) orang staf, 1 (satu) orang fungsional perencanaan dan 2 (dua) orang staf keuangan.

H. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Indikator ini ditunjang oleh program :
 - 1) Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/ Kota dengan target anggaran Rp 4.660.263.532 dan realisasi sebesar Rp Rp. 4.262.776.134 Atau capaian 91,47 %

Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/ Kota merupakan program rutin pelaksanaan operasional kantor yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari :

 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Total anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 4.660.263.532, dengan realisasi sebesar Rp 4.262.776.134 Atau capaian 91,47 %

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, kolaboratif, holistik, berkelanjutan dengan tujuan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan berorientasi hasil.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Indikator : NILAI KEMATANGAN INOVASI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

Definisi Operasional :

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam website IGA (Innovative Government Award) Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi :

Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi :

Hasil Penilaian Pengentrian Kriteria Inovasi pada aplikasi IGA dan telah ditetapkan dalam Laporan Hasil pelaporan inovasi daerah tahun-n

Sumber Data : Bapedalitbang, Aplikasi pengentrian kriteria inovasi Kemendagri

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	95	95

Penilaian dilakukan terhadap inovasi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mendaftarkan inovasi Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas) pada website IGA. Berikut hasil penilaian inovasi e-Pas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 :

Tabel 3.9
Hasil Penilaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

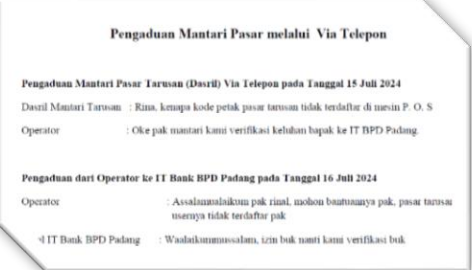
No	Nama Inovasi	Urusan pemerintahan Utama	Nilai Kematangan	Prediket
1	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Perdagangan	95	Sangat Tinggi

Dari hasil penilaian menunjukkan Prediket inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2024 adalah **Sangat Tinggi**.

Screenshoot Surat Sekretaris Daerah tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024 terdapat pada Lampiran 3

Berikut bentuk *Progress Reform (before – after)* pelaksanaan Inovasi OPD :

Tabel 3.10
Progress Reform (before – after) pelaksanaan Inovasi OPD sasaran startegis 2

Sebelum (Before)	Sesudah (After)
 Awal Launching E-retribusi Pasar  Aplikasi E-retribusi Pasar 	 Penyediaan kontak layanan Inovasi E-retribusi pasar  Transkrip pembicaraan telpon mantri pasar dengan operator layanan  Pelayanan konsultasi penggunaan alat P.O.S Mantri Pasar

e-Pas atau Retribusi pasar elektronik dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi petugas pasar/ mantri pasar dalam hal pelaporan dan penyetoran retribusi petak toko dan pelataran

Manfaat Pelaksanaan inovasi elektronik retribusi pasar (e-Pas) :

1. Terhindarnya dari kesalahan perhitungan setoran yang rentan pada transaksi manual

2. Kontrol dari Dinas akan lebih cepat terutama dalam mengantisipasi macetnya setoran
3. Meningkatkan PAD pasar

Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas) dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sistem layanan, terutama dalam hal penggunaan alat P.O.S yang digunakan oleh mantri pasar. Dengan inovasi ini diharapkan, segala macam kendala dan permasalahan yang ditemui mantri dalam pengoperasian alat pembayaran setoran retribusi akan dapat diselesaikan melalui kontak layanan yang real time selama jam operasi pasar.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022-2024 :

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024
1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	85	95	95

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Sasaran ke 2 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95	100	95	Akan Tercapai

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan nilai capaian indikator nilai kematangan inovasi tidak dapat dibandingkan dengan provinsi karena, nilai kematangan inovasi tidak menjadi indikator dinas perdagangan dan perindustrian ataupun dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera Barat.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Penyebab keberhasilan capaian inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :
 - a. Sinergi dan komitmen bersama yang melibatkan seluruh agen inovasi agar inovasi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.
 - b. Dukungan Dinas terkait secara proaktif diantara BPKPAD, Dinas Kominfo dan Bank Nagari
- Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan terus berupaya bersinergi dan berkomitmen bersama melibatkan seluruh agen inovasi agar inovasi tetap hidup dan mencapai perbaikan yang efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Penerapan inovasi e-retribusi ini adalah :

- Efisiensi Anggaran APBD terutama dalam percepatan penyetoran PAD dari mantri pasar
- Terhindarnya dari kesalahan perhitungan setoran yang rentan pada transaksi manual

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Indikator ini didukung oleh program :
 - 1) Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan target anggaran Rp 4.385.679.181 Dan realisasi sebesar Rp 4.188.599.159 Atau capaian 95,51%
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target anggaran Rp 2.838.352.585 dan realisasi sebesar Rp 2.822.407.900 atau capaian 99,44 %
- Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 7.224.031.766, dengan realisasi sebesar Rp 7.011.007.059 atau capaian 97,05 %
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi sebesar 2,95 %

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kemandirian Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi adalah Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan Transmigrasi atau lokasi permukiman Transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut merupakan kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, yang secara administrasi terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Lunang, Kecamatan Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal, dengan jumlah penduduk sebanyak 84.200 jiwa dengan luas lahan 234.710 Ha.

Kemandirian Transmigrasi diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi, yaitu :

1. Ekonomi
2. Sosial Budaya
3. Lingkungan
4. Jejaring Sarana dan Prasarana
5. Kelembagaan

Kelima dimensi ini digunakan dalam pengukuran Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi, yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 ini.

Indikator : INDEKS KEMANDIRIAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Definisi Operasional :

Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi yang disebut juga dengan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK-Trans) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi apakah berkembang, mandiri atau berdaya saing. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan bekerjasama dengan lembaga/ universitas yang bersifat independent. Pengukuran dilakukan atas 4 (empat) dimensi yaitu : Ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana dan kelembagaan.

Formulasi :

Nilai pengukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hasil kerjasama dengan lembaga/ universitas yang ditunjuk

Sumber Data : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatkan kemandirian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61	76,53*	99,90

Pada tahun 2023, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan melakukan evaluasi dan penilaian perkembangan indeks kawasan Transmigrasi. Pengukuran indeks dilakukan di 5 (lima) dimensi pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan metode kuisioner evaluasi terhadap 28 (dua puluh delapan) responden yang terdiri dari unsur pemerintahan, LSM, tokoh masyarakat dan anggota legislatif.

Pada tahun 2024 penilaian Indeks Kemandirian Transmigrasi dilakukan mandiri oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, namun hasil penialain tersebut masih belum diumumkan. Berikut hasil penilaian Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi yang kemudian disebut dengan Indeks Kawasan Transmigrasi :

Tabel 3.14
Hasil Penilaian Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2024*

No	Dimensi	Indeks Dimensi	Indeks Komposit
1	Ekonomi	73,18	28,69
2	Sosial Budaya	86,01	11,21
3	Lingkungan	71,24	5,51
4	Jejaring Sarpras	79,86	22,59
5	Kelembagaan	72,62	8,54
JUMLAH			76,53

Dari hasil evaluasi, Indeks Kawasan Transmigrasi pada Tahun 2023 sebesar **76,53** dengan status **BERDAYA SAING**

Screenshot SK Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terkait Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 terdapat pada lampiran 4

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2022-2024 :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Indeks Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024
1	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	70,27	76,53	76,53*
	Status Kawasan	Mandiri	Berdaya Saing	Berdaya Saing

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut pada tahun 2023, dari **Mandiri** pada tahun 2022, menjadi **Berdaya Saing** pada tahun 2023, dan diharapkan akan dapat bertahan berdaya saing dan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Sasaran ke 3 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,53	80,41	95,17	Akan Tercapai

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

- Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi diberikan kepada Kawasan, bukan wilayah administratif, jadi tidak bisa dilakukan perbandingan dengan nasional/ provinsi.
- Pada tahun 2023, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut mendapat prediket “berdaya saing”. 3 (tiga) dari 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi Prioritas nasional telah berstatus berdaya saing. Prediket ini merupakan level tertinggi Kawasan Transmigrasi, dimana artinya Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut telah dapat disetarakan perkembangannya dengan daerah lain, ataupun dapat diwujudkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Penyebab keberhasilan capaian Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi adalah :
 - a. Dukungan Pemerintah Daerah yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui dana TP ataupun DAK Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI
 - b. Sinergitas OPD terkait dan Legislatif, baik itu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD maupun melalui koordinasi dengan pusat terkait Pembangunan Kawasan
 - c. Masyarakat transmigrasi yang proaktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup
- Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan tetap melaksanakan program pengembangan transmigrasi, dalam rangka mempertahankan status “berdaya saing” Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut saat ini.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah dilakukan adalah :

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam Pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM Masyarakat Transmigrasi secara berkelanjutan melalui dana Tugas Pembantuan Kemendes, PDT, Transmigrasi RI pada tahun 2023, dan dilanjutkan dengan koordinasi yang berkelanjutan dengan Kementerian Transmigrasi dalam upaya Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di tahun 2024
- b. Efisiensi anggaran tidak mengurangi capaian kinerja, dimana dengan realisasi anggaran dibawah pagu anggaran, capaian kinerja Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi hampir mencapai 100% yaitu 99,99%
- c. Alih teknologi di bidang pertanian dan Perkebunan yang sudah mulai dikembangkan oleh Masyarakat transmigrasi

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target anggaran Rp 89.999.888 dan realisasi sebesar Rp 89.859.089 atau capaian 99,84%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas

Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2016 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Pengembangan Infrastruktur, SDM dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi

Analisa Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024, ruang lingkup pemberdayaan Transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- 1 Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan : Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
Subkegiatan : Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman
Pagu Anggaran : Rp. 89.999.888,-

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

- a. Rapat Koordinasi Transmigrasi tahun 2024 di Makasar
- b. FGD evaluasi satuan kawasan pengembangan dan Pusat SKP bersama Tim dari kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Kec. Silaut
- c. Operasionalisasi Gedung Pusat Bisnis di KTM Lunang Silaut dengan Kerjasama dengan Bank Nagari
- d. Rapat koordinasi penyelesaian masalah pertanahan kawasan transmigrasi di dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat
- e. Koordinasi ke Kementerian Transmigrasi RI terkait kelanjutan pembangunan di kawasan transmigrasi Lunang Silaut dengan Pj Bupati Pesisir Selatan.



Gambar 3.1 FGD evaluasi Satuan Kawasan Pemukiman (SKP) dengan Kemendes, PDT, Transmigrasi di Silaut



Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Transmigrasi tahun 2024 di Makassar



Gambar 3.3 Cek Fisik Gedung Pusat Bisnis di KTM Lunag Silaut dengan Bapak PJ Bupati



Gambar 3.4 Penandatanganan PKS dengan Bank Nagari Terkait Pemanfaatan Gedung Pusat Bisnis di KTM Lunang Silaut



Gambar 3.5 Kunjungan ke Kementerian Transmigrasi dengan Bapak Pj Bupati Pessel terkait keberlanjutan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut



Gambar 3.6 Rapat Koordinasi penyelesaian masalah pertanahan kawasan transmigrasi di dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

PDRB (*Produk Domestik regional Bruto*) merupakan indikator makro ekonomi yang merepresetasikan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB dihitung melalui 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. PDRB Sektor unggulan dihitung berdasarkan pendekatan lapangan usaha.

Berdasarkan Publikasi badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2024, tercatat bahwa menurut lapangan usaha, PDRB sektor Perdagangan dan PDRB sektor pengolahan/ Industri pengolahan selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Tercatat, PDRB sektor Perdagangan menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama 5 (lima) tahun berturut turut. Kemudian untuk sektor Industri Pengolahan menempati urutan keenam pada tahun 2019-2021 dan urutan kelima pada tahun 2022, dan turun lagi ke urutan keenam pada tahun 2023.

Nilai PDRB ini juga menggambarkan tingkat daya saing sektor perekonomian daerah, apakah Kabupaten Pesisir Selatan mampu mengatasi ataupun mengantisipasi terjadinya gejolak internal dan eksternal agar tidak begitu berefek kepada masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Selatan cukup terpuruk, laju PDRB sektor-sektor utama melambat. Hal itu mengindikasikan bahwa daya saing perekonomian daerah menurun. Kemudian pada akhir tahun 2021 dan 2022, pemerintah membuktikan bahwa sektor perekonomian daerah sudah cukup kuat, dimana sektor-sektor utama sudah kembali bangkit dengan laju PDRB yang meningkat. Begitupun juga dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada awal triwulan III tahun 2024, setelah gejolak ekonomi global inflasi dan diikuti krisis pangan yang disebabkan oleh el nino pada tahun 2023.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis 4 ini, yaitu : Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan, Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian dan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK). Berikut penjelasan masing-masing indikator :

Indikator 1 : LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Definisi Operasional :

Laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan merupakan pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor Industri Perdagangan.

Formulasi :

Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan : Nilai pertumbuhan sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka tahun-n.

Sumber Data :

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Capaian IKU ke 1 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,50	4,92 *	75,69

*data sementara (tahun 2023)

Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan berbagai komponen dan elemen masyarakat yang bergerak pada sektor perdagangan, meliputi Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hasil perhitungan ini kemudian dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) yang diterbitkan setiap tahunnya. Data laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024, secara resmi dirilis oleh BPS pada akhir trwiiwulan I tahun 2025, sehingga data yang diberikan saat ini adalah data sementara (tahun 2023).

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2023, terlihat bahwa capaian kinerja Laju PDRB Sektor Perdagangan kurang dari 100% yaitu hanya 75,69 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, harapan pemerintah terhadap kenaikan laju PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 tidak berjalan dengan baik, dengan realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti tidak stabilnya ekonomi dalam penanggulangan inflasi, krisis pangan karena el nino, memperpanjang waktu pemulihan pasca covid 19, sehingga harapan kenaikan laju pertumbuhan sektor

perdagangan yang akan naik secara progresif tahun 2023 belum dapat dicapai sesuai angka yang ditargetkan.

Disamping itu, intervensi pemerintah dalam revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan pasar rakyat juga tidak optimal, dimana dengan adanya refocusing anggaran, baik yang disebabkan pemulihan pasca covid-19 ataupun karena penandaan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya yang menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehab pasar. Akibatnya pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat khususnya pedesaan tidak berfungsi dengan baik dan perekonomian masyarakat yang hidup disekitar pasar tidak terangkat seperti yang diharapkan.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022-2024 :

Tabel 3.18
Perbandingan Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan tahun 2022, 2023, 2024

No	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024*
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	5,82	4,92	4,92*

*data sementara (tahun 2023)

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian laju pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun nilai realisasi PDRB sektor perdagangan menurut ADHK sendiri yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi telah kembali bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19. Ini artinya harapan pemerintah terhadap naiknya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pasca covid 19 tidak sesuai harapan. Laju PDRB sektor perdagangan mengalami perlambatan bertahap hingga kembali ke kondisi sebelum covid-19. Kontribusi beberapa lapangan usaha sektor ekonomi penunjang sektor perdagangan belum optimal terutama penanganan gejala ekonomi pasca covid-19.

Gejolak inflasi dan krisis pangan akibat el nino pun berpengaruh pada sektor perdagangan Masyarakat Pesisir Selatan pada tahun 2023. Inflasi terjadi pada barang barang kebutuhan pokok pada semester akhir tahun 2022 hingga awal 2023, sehingga turunnya laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan pada tahun ini.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator ke 1 Sasaran ke 4 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,92	8,38	58,71	Tercapai 70-80 %

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	4,92*	4,75*	4,85*

Catatan : *Data tahun 2023

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2024

2. Sumatera Barat Dalam Angka 2024

3. Berita Resmi Statistik, No. 13/02/Th. XXVII, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW IV 2023

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

a. Penyebab kegagalan capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah :

- Berdasarkan data Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2024, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 gejolak inflasi dan krisis pangan sebagai dampak el nino cukup berpengaruh pada sektor perdagangan Masyarakat Pesisir Selatan pada tahun. Inflasi terjadi pada barang barang kebutuhan pokok

hingga awal tahun 2024, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 dan 2024.

- Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP untuk pembangunan dan rehab pasar belum optimal
- b. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pelaksanaan Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Bidang Perdagangan difokuskan pada penanganan inflasi dan antisipasi deflasi, upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemantauan harga bahan pokok. Pada awal tahun 2024, inflasi sudah dapat terkendali, dengan realisasi year to year turun dari tahun sebelumnya. Keadaan ini terus menurun hingga pada triwulan III terjadi deflasi harga bahan pokok utama. Bahan pokok yang sangat mempengaruhi inflasi-deflasi ini adalah Beras, Bawang Merah dan Cabe.
- c. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang tepat untuk mempercepat kembali laju pertumbuhan PDRB sektor Industri, diantaranya :
 - Percepatan pemanfaatan aset pasar yang belum beroperasi, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
 - Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Pembangunan Pasar rakyat
 - Merumuskan formula yang tepat baik sasaran ataupun metode dalam penaggulan inflasi
 - Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui promosi melalui pameran tingkat nasional ataupun internasional
 - Menargetkan produk/ komoditi potensial ekspor serta pembinaan terhadap pelaku usaha potensial ekspor

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bidang Perdagangan adalah :

- a. Kerjasama dengan BUMD yaitu Bank Nagari dalam hal pemungutan retribusi pasar dalam upaya menggenjot PAD sektor Perdagangan.
- b. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 - Total anggaran urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 1.231.538.385, dengan realisasi sebesar Rp 1.219.962.122 atau capaian 99,06 %
 - Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 0,94%

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program :

- a. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan target anggaran Rp 884.675.048 dan realisasi sebesar Rp 882.974.100 Atau capaian 99,81%
- b. Program Stabiisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan target anggaran Rp 29.499.610 dan realisasi sebesar Rp 26.926.050 atau capaian 91,28%
- c. Program Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan target anggaran Rp.283.356.097 dan realisasi sebesar Rp 276.119.472 Atau capaian 97,45 %
- d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan target anggaran Rp.34.007.630 dan realisasi sebesar Rp 33.942.500 atau capaian 99,81 %

Analisa Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan intervensi terhadap sektor ini, dengan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya dan diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2016 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan sektor perdagangan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting
3. Optimalisasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Standarisasi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2024, bentuk intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap nilai PDRB sektor Perdagangan, adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

- 1 Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Subkegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pagu Anggaran : Rp. 204.574.844

Pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

- a. Pembangunan Los Pasar Barung-Barung Belantai
- b. Serah terima Hibah Pasar Lunang yang dibangun dengan dana Tugas Pembantuan Tahun 2023
- c. Koordinasi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat terkait pembangunan Pasar Painan

Penjelasan

- a. Pembangunan Los Pasar Barung-Barung Belantai

Sebagai dampak Bencana Banjir Bandang yang di beberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Pasar Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi salah satu Pasar yang terdampak, dimana tiang los pasar yang semula dari kayu telah patah dan rusak. Pasar barung-barung belantai sebagai pusat perekonomian Masyarakat nagari barung-barung belantai dan merupakan pasar yang berada di Jalan lintas provinsi, dirasa sangat perlu untuk dilakukan perbaikan secepatnya. Berikut kondisi Pasar Barung-barung Belantai.



Gambar 3.7 Kondisi Los Pasar sebelum Pembangunan



Gambar 3.8 Kondisi Los Pasar saat Pembangunan



Gambar 3.9 Kondisi Los Pasar setelah Pembangunan

- b. Serah terima Hibah Pasar Lunang yang dibangun dengan dana Tugas Pembantuan Tahun 2023 di Kementerian Perdagangan

Pasar Lunang dibangun dengan tetap mempertahankan pasar yang lama dengan penambahan bangunan baru di lokasi tersebut. Pelaksanaan Pembangunan yaitu pada tahun 2023 dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152.2015). Hal ini juga akan berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap pasar-pasar yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.

SNI Pasar Rakyat merupakan standarisasi baku dalam pengelolaan pasar rakyat. SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. “Dengan demikian Pasar Rakyat dikelola secara profesional akan menjadi sarana perdagangan yang komprehensif dan kompetitif, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan omset perdagangan,”

Terdapat **3 persyaratan** dalam SNI pasar rakyat yaitu :

1. **Persyaratan umum** terdiri dari lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.
2. **Persyaratan teknis** terdiri dari ruang dagang, aksesibilitas dan zona, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi, dan keselamatan dalam bangunan.

3. **Persyaratan pengelolaan** terdiri dari prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang, serta pembangunan pasar.



Gambar 3.10 Serah Terima Hibah Pasar Lunang

- c. Koordinasi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat terkait pembangunan Pasar Painan

Pasar Painan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2023, sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Untuk itu Dinas Perdagangan dan Transmigrasi selaku Dinas yang bertanggung jawab atas penyediaan Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan, harus turut serta melakukan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Pasar Painan yang dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat.



Gambar 3.11 Rapat SCM Pembangunan Pasar Painan di BPPW Sumatera Barat

- 2 Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- Subkegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pagu Anggaran : Rp. 680.100.204

Sebagai salah satu sarat Pasar SNI, diperlukan pengelolaan pasar yang baik, untuk itu Dinas Perdagangan dan Transmigrasi senantiasa melakukan pembinaan kepada para petugas pasar, upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- Pemberian honorarium petugas pasar berdasarkan ketepatan waktu penyetoran retribusi petak pasar
- Pengadaan outsourcing petugas keamanan dan kebersihan pasar
- E-retribusi menjadi salah satu inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam upaya mengurangi kebocoran pungutan.

Berikut adalah rekapitulasi Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan :

Tabel 3.21
Rekapitulasi Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS PASAR	JUMLAH
1	PASAR KABUPATEN	11
2	PASAR SERIKAT	9
3	PASAR NAGARI	30
	JUMLAH	50

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2024

Tabel 3.22
Data Pasar Kabupaten

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasar Rakyat Carocok Mandeh	Koto XI Tarusan	40	40			
2	Pasar Tarusan	Koto XI Tarusan	63	61	2		
3	Pasar Baru Bayang	Bayang	120	88	32		
4	Pasar Sago	IV Jurai	70	70			
5	Pasar Painan	IV Jurai	Proses Pembangunan				
6	Pasar Kuok	Batang Kapas	104	80		24	
7	Pasar Kambang	Lengayang	72	72	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pasar Balai Selasa	Ranah Pesisir	65	51	7	7	
9	Pasar Air Haji	Linggo Sari Baganti	22	16		6	
10	Pasar Inderapura	Pancung Soal	34	24	10	-	
11	Pasar Raya Tapan	BAB Tapan	76	76	-	-	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2024

Tabel 3.23
Data Pasar Serikat

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Pasar Br-Br Belantai	Koto XI Tarusan	32		32		
2	Pasar Koto Berapak	Bayang		Los			
3	Pasar Lumpo	IV Jurai	22	22			
4	Pasar Surantiah	Sutera		Proses Pembangunan			
5	Pasar Lakitan	Lengayang	8	8			
6	Pasar Sungai Tunu	Ranah Pesisir	8	8			
7	Pasar Punggasan	Linggo Sari Baganti	9	9			
8	Pasar Muaro Sakai	Pancung Soal	32	32			
9	Pasar Sungai Sirah	Silaut	12	12			

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2024

Tabel 3.24
Data Pasar Nagari

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasar Siguntur	Koto XI Tarusan					
2	Pasar Duku	Koto XI Tarusan					
3	Pasar Wisata Mandeh	Koto XI Tarusan					
4	Pasar Api-API	Bayang					
5	Pasar Talaok	Bayang					
6	Pasar Pancuang Taba	Bayang Utara					
7	Pasar Asam Kumbang	Bayang Utara					
8	Pasar Kapencong	Bayang Utara					
9	Pasar Taluak Batang Kapas	Batang Kapas					
10	Pasar Ampiang Parak	Sutera					
11	Pasar Padang Cupak	Lengayang					
12	Pasar Koto Baru	Lengayang					
13	Pasar Minggu Pulai	Lengayang					
14	Pasar Gantiang	Lengayang					
15	Pasar Labuhan	Ranah Pesisir					
16	Pasar Sungai Liku	Ranah Pesisir					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pasar Pelangai Gadang	Ranah Pesisir					
18	Pasar Lama Air Haji	Linggo Sari Baganti					
19	Pasar Simpang Lagan	Linggo Sari Baganti					
20	Pasar Lagan	Linggo Sari Baganti					
21	Pasar Rantau Simalenang	Linggo Sari Baganti					
22	Pasar Bukit Aie Haji	Linggo Sari Baganti					
23	Pasar Hilalang Panjang	Pancung Soal					
24	Pasar Sungai Gemuruh	Pancung Soal					
25	Pasar Pagi Lunang 1	Lunang					
26	Pasar Kumbuang	Lunang					
27	Pasar Lunang 2	Lunang	12	Baik			
28	Pasar Lunang 3	Lunang					
29	Pasar Silaut 3	Silaut					
30	Pasar Silaut 2	Silaut					

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2024

B. Penyediaan dan Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Subkegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pagu Anggaran : Rp. 9.499.660

Kegiatan ini, dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan inflasi jangka menengah, dengan melaporkan hasil pemantauan harga Bahan Pokok ke Kementerian Perdagangan di satu titik sampel pasar Kabupaten. Dengan demikian dapat dihitung fluktuasi harga bahan pokok untuk menentukan tingkat inflasi daerah. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) dihitung dengan menggunakan perhitungan koefisien variasi harga bahan pokok tahun 2024, sebagaimana pada tabel 3.25.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah :

- a. Pemantauan harga dan memberikan laporan secara berkala kepada Kementerian Perdagangan RI, dalam upaya penanggulangan dampak inflasi
- b. Rapat penanggulan Inflasi setiap minggunya
- c. Rakor Inflasi

Penjelasan

- a. Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Pelaporan Harga secara Berkala
Pada tabel 3.25 , terlihat bahwa koefisien variasi rata-rata adalah 7,623, yang artinya harga bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan tidak begitu berfluktuasi selama tahun 2024, dengan koefisien variasi berada dibawah 9%.

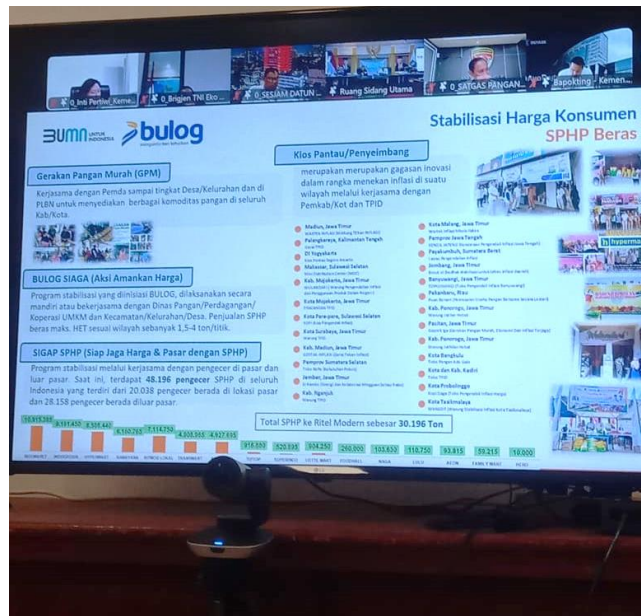


Gambar 3.12 Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Laporan Harian harga Bahan Pokok

- b. Rapat penanggulangan Inflasi setiap minggunya



Gambar 3.13 Rapat Penanggulangan Inflasi



Tabel 3.25
Keefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Pokok dan Barang Penting
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Komoditi	2024												Standar Deviasi	Rata2	KV 2024
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beras Medium	16.500	16.500	17.000	18.000	18.500	18.500	18.000	18.000	18.500	17.000	16.500	16.500	865	17.458	4,954
2	Gula	17.000	17.800	18.000	18.250	18.250	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500	18.000	18.000	443	18.025	2,457
3	Minyak Goreng Curah	14.400	14.400	15.500	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	17.100	18.000	18.000	1.157	16.158	7,161
4	Tepung Terigu	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	13.500	13.500	14.000	14.000	13.500	13.500	261	13.750	1,899
5	Cabe	43.500	67.200	100.000	75.000	65.000	80.000	65.000	40.000	35.000	30.000	28.000	38.000	22.953	55.558	41,314
6	Bawang Merah	30.600	33.200	40.000	45.000	48.000	47.000	38.000	30.000	28.000	32.000	28.000	32.000	7.379	35.983	20,508
7	Bawang Putih	39.700	38.200	42.000	40.000	42.000	42.000	38.000	38.000	40.000	40.000	38.000	40.000	1.566	39.825	3,931
8	Daging Ayam	41.700	41.700	47.100	48.000	48.000	48.000	40.000	38.200	38.200	38.700	38.700	38.200	4.293	42.208	10,172
9	Telur Ayam	31.200	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	30.700	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	1.481	30.408	4,871
10	Daging Sapi	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	3.892	148.333	2,624
11	Kacang Kedelai	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	522	17.500	2,984
12	Garam	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.435	15.333	9,362
13	Ikan Asin Teri	80.000	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	6.396	95.000	6,733
14	Ikan Segar Tuna	43.400	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	50.000	50.000	2.533	48.617	5,211
15	Susu Kental Manis	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	396	13.792	2,875
16	Kacang Tanah	31.200	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	31.000	31.000	31.000	478	31.617	1,513
17	Kacang Hijau	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	515	25.583	2,013
18	Mie Instan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	261	3.250	8,034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Ketela Pohon	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000	6.500	450	6.542	6,882
20	Tempe	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.529	21.958	6,965
21	Tahu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	389	10.167	3,829
22	Udang	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000	90.000	90.000	2.887	89.167	3,237
23	Jeruk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	905	20.500	4,412
24	Pisang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-
25	Kentang	18.000	18.000	22.000	21.000	19.000	19.000	22.000	20.000	18.000	16.000	17.000	18.000	1.907	19.000	10,036
26	Tomat	17.000	18.000	20.000	16.000	14.000	13.000	8.000	7.000	6.000	12.000	10.000	8.000	4.680	12.417	37,691
	KOEFISIEN VARIASI HARGA RATA-RATA															7,623

2. Program : Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Subkegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pagu Anggaran : Rp. 19.999.950

Operasi Pasar dilaksanakan dalam upaya penanggulangan dampak inflasi jangka pendek. Selama tahun 2024, telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) titik pelaksanaan operasi pasar. Pelaksanaan operasi pasar ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan Perum Bulog. Berikut data pelaksanaan operasi pasar tahun 2023 :

Tabel 3.26
Data Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2024

No	Kecamatan	Hari/ Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1	IV Jurai	4 Februari 2024	Kantor Walinagari Lumpo
2	Ranah Pesisir	28 Maret 2024	Kantor Camat
3	Koto XI Tarusan	21 November 2024	Nagari Ampang Pulau Tarusan



Gambar 3.15 Operasi Pasar di Kecamatan IV Jurai



Gambar 3.16 Operasi Pasar di Kecamatan Ranah Pesisir



Gambar 3.17 Operasi Pasar di Kecamatan Koto XI Tarusan

C. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Subkegiatan : Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
- Pagu Anggaran : Rp. 34.007.630

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan dan pembinaan kepada distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan yang memiliki Nomor induk Berusaha

(NIB) dan pendataan pedagang pasar, komoditi unggulan, toke/ pengumpul dan minimarket di 7 (tujuh) kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan

D. Standarisasi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan
- Subkegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang
- Pagu Anggaran : Rp. 283.356.097

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dilakukan dengan pelayanan kemetrolagian berupa tera, tera ulang atau kalibrasi alat ukur dalam yang digunakan dalam perdagangan. Tera berarti pengujian atas UTTP yang belum digunakan. Sementara itu, tera ulang berarti pengujian atas UTTP yang sebelumnya pernah ditera.

Pada tahun 2024, pelaksanaan tera-tera ulang yang dilakukan meliputi pelayanan tera-tera ulang UTTP di kantor dinas UPTD Kemetrolagian, Pelayanan ke Pasar-pasar strategis, Perkebunan, puskesmas dan posyandu.



Gambar 3.18 Kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP di Pasar, Perkebunan, Puskesmas dan Posyandu

Selain itu, kalibrasi setiap tahun atas UTTP juga dilakukan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan, dengan demikian maka pemerintah menjamin adanya layanan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian ukuran dan standarisasi alat ukur, timbang dan takar yang digunakan konsumen.

Indikator 2 : LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERINDUSTRIAN/ INDUSTRI PENGOLAHAN

Definisi Operasional :

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri merupakan pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor Industri Pengolahan/ *Manufacturing*.

Formulasi :

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian/ Industri Pengolahan : Nilai pertumbuhan yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka tahun-n.

Sumber Data :

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Capaian IKU ke 2 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian/ Industri Pengolahan	4,50	2,47 *	54,89

Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan berbagai komponen dan elemen masyarakat yang bergerak pada sektor Industri Pengolahan/ Manufaktur. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan intervensi terhadap sektor ini, dengan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya dan diatur dalam peraturan yang berlaku. Data laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024, secara resmi dirilis oleh BPS pada akhir triwulan I tahun 2025, sehingga data yang diberikan saat ini adalah data sementara (tahun 2023).

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2023, terlihat bahwa capaian kinerja Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan sangat rendah yaitu hanya 54,89 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, harapan pemerintah terhadap

kenaikan laju PDRB sektor Industri Pengolahan pada tahun 2023 tidak berjalan dengan baik, dengan realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti inflasi, krisis pangan karena el nino, hal ini memperpanjang waktu pemulihan pasca covid 19. Selain itu kebutuhan akan perputaran modal yang cepat, pasca covid-19 menyebabkan maraknya terjadi pergeseran pekerjaan utama (*job shifting*) pelaku usaha Industri rumah tangga/ IKM menjadi pedagang/ PKL, sehingga harapan naiknya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2023 belum dapat dicapai sesuai angka yang ditargetkan.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022-2024 :

Tabel 3.28
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)
tahun 2022, 2023, 2024

Kode	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian/ Industri Pengolahan	2,18	2,47	2,47*

*data sementara (tahun 2023)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2023 laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan kembali meningkat, setelah sebelumnya melambat menyesuaikan dengan kondisi sebelum Covid-19 dengan nilai sebesar 2,47%.

Dari hal ini terlihat bahwa peluang munculnya sektor usaha industri kreatif pada saat pemulihan ekonomi pasca covid-19 baru berdampak dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2023. Transformasi metode pemasaran yang beralih ke digital terus berkembang dan telah mampu membuka pangsa pasar baru Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian/ Industri Pengolahan	2,47	7,80	31,67	Tercapai 50%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian/ Industri Pengolahan	%	2,47*	3,09*	4,64*

Catatan : *Data tahun 2023

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2024

2. Sumatera Barat Dalam Angka 2024

3. Berita Resmi Statistik, No. 13/02/Th. XXVII, Pertumbuhan Ekonomi Indonesi TW IV 2023

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

a. Penyebab keberhasilan capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian adalah :

- Membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca covid-19. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi (inflasi yang rendah) pada awal triwulan III tahun 2024
- Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM melalui dana DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM serta Pelatihan, pendampingan dan sertifikasi produk IKM melalui dana DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM Kementerian Perindustrian RI

- b. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang tepat untuk mempercepat kembali laju pertumbuhan PDRB sektor Industri, diantaranya :
 - a. Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
 - b. Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM serta diversifikasi produk olahan
 - c. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :
 - Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 12.461.409.155, dengan realisasi sebesar Rp 12.142.367.154 Atau capaian 97,44 %
 - Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 2,56 %

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target anggaran Rp 12.435.409.155 dan realisasi sebesar Rp 12.116.542.404 Atau capaian 97,44%
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target anggaran Rp 26.000.000 dan realisasi sebesar Rp 25.824.750 atau capaian 99,33%

Analisa Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan sektor perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Industri
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri
3. Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4. Pengawasan, Pengendalian Perizinan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Pada tahun 2024, bentuk intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, adalah sebagai berikut :

A. Pengembangan Sumber Daya Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Pagu Anggaran : Rp. 162.000.000

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan sumber daya industri pada tahun 2024, yaitu :

a. Penunjang Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan

Agenda Dekranasda yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdiri dari Pameran Inacraft tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, HUT Dekranas ke 44 di Kota Solo, Lomba Desain Busana Muslimah di Padang, Rapat koordinasi (Rakor) pembina kerajinan Dekranasda se-Sumatera Barat serta pembinaan langsung ke IKM Kerajinan.



Gambar 3.19 Pameran Inacraft tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC)



Gambar 3.20 Pameran Inacraft tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) (lanjutan)



Gambar 3.21 HUT Dekranas ke 44 di Kota Solo

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Pagu Anggaran : Rp. 250.000.156

Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Industri, terdiri atas Pemberian bantuan berupa hibah uang kepada kelompok IKM, yaitu :

- a. Hibah Uang sebesar Rp. 190.000.000 kepada kelompok keripik Lento Tiga Saudara nagari Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan untuk pengembangan sarana produksi keripik lento
- b. Hibah Uang sebesar Rp. 47.500.000 kepada kelompok IKM Batik Jembatan Akar Nagari Puluik Puluik Kecamatan Bayang Utara untuk Pengembangan usaha Batik

C. Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Pagu Anggaran : Rp. 12.023.408.999

Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan IKM dengan sasaran adalah kelompok IKM. Kelompok IKM yang menjadi sasaran pemberdayaan industri pada tahun 2024 adalah kelompok IKM pengolahan Gambir di Kecamatan Sutera

Subkegiatan ini ditunjang oleh dana DAK Fisik dan DAK non Fisik Kementerian Perindustrian yaitu DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Gambir tahap II di Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM di Sentra IKM Gambir Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera dan beberapa IKM pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut rincian pelaksanaan subkegiatan ini :

- a. Pembangunan Sentra IKM Minyak Atsiri di Kecamatan Lunang (DAK Fisik).
Berikut alokasi anggaran DAK Fisik Kementerian Perindustrian tahun 2024 :

Tabel 3.31
Alokasi dana DAK Fisik Kementerian Perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

No	Kegiatan	Pekerjaan		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Gambir di Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Tahap II	1	Revitalisasi Sarana produksi dan infrastruktur penunjang Sentra IKM Pengolahan Gambir	3.830.778.000	3.830.778.000
		2	Pengadaan Mesin dan Peralatan	5.145.810.000	5.091.891.000
		3	Kegiatan Penunjang	475.398.269	361.287.250



Gambar 3.22 Dokumentasi Pembangunan Sentra IKM Gambir di Kecamatan Sutera

- b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM/ PK2SIKM (DAK Non Fisik)

Program PK2SIKM terdiri atas beberapa menu kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.32
Pelaksanaan DAK-Non Fisik PK2SIKM tahun 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	Output
A	Peningkatan SDM Dan Daya Saing IKM		
1	Pelatihan Teknis Produksi	Sentra IKM Pengolahan Gambir	47 IKM
2	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	Sentra IKM Pengolahan Gambir	47 IKM
3	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
4	Fasilitasi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil	Kab. Pesisir Selatan	64 Sertifikat
B	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM		
1	Pelatihan Pengelola dan Operator Unit Pelayanan Teknis/Rumah Kemasan	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 Sentra
C	Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM		
1	Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 Sentra
D	Pelatihan dan Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor		
1	Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Berorientasi Ekspor	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 Sentra
2	Pelatihan Prosedur dan Dokumen Perdagangan Luar Negeri	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
3	Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
4	Promosi Ekspor IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM

- c. Fasilitasi Legalitas produk : Sertifikat TKDN/ Tingkat Komponen Dalam Negeri (DAK Non Fisik)

Berikut data Fasilitasi Sertifikat TKDN tahun 2024 :

Tabel 3.33
Rekapitulasi Fasilitasi Sertifikasi TKDN Tahun 2024

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Bidang Usaha	Nama Produk/ Merek	Nilai TKDN	No. Sertifikat	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PR Apriadi	Jln Zaini Zein, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Fres Water	24%	1352 0/TK DN/IK /XI/20 24	08-Nov-24

1	2	3	4	5	6	7	8
2	PR Beny Eka Saputra	Muara Gadang,Air Haji,Linggo Sari Baganti,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	13712/TK DN/IK /XI/2024	08-Nov-24
3	PR Irma Khresva Novel	Pasia Palangai,Pasia Pelangai,Ranah Pesisir ,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Rakik	Snack Palangai	34%	13861/TK DN/IK /XI/2024	11-Nov-24
4	PR Jamardi	MUARO GADANG BARAT,Muaro Gadang Air Haji,Linggo Sari Baganti,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kerupuk Jengkol	Ratu Jengkol	38%	13830/TK DN/IK /XI/2024	11-Nov-24
5	PR Liza Wahyuni	AMBACANG BADAQ,Bukik Kaciak Lumpo,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Serundeng	Serundeng Alwi	38%	13865/TK DN/IK /XI/2024	11-Nov-24
6	PR Widya Darwin	JLN.PANCURAN BOGA PAINAN,Painan Selatan Painan,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Seprai Dan Gorden	Seprai Katun	38%	13799/TK DN/IK /XI/2024	11-Nov-24
7	PR Yuni Malyeni	KOTO LANGANG,Sungai Liku Pelangai,Ranah Pesisir,Kabupaten Pesisir Selatan ,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	13913/TK DN/IK /XI/2024	12-Nov-24
8	PR Eva Sariyati	GUNCER JAYA,Gurun Panjang Utara,Bayang ,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	RANDANG LOKAN DAN DAGING	Denden g Ikan "DAPO ER AA"	38%	14016/TK DN/IK /XI/2024	13-Nov-24

1	2	3	4	5	6	7	8
9	PR Hasma Yetti.n	KAYU SEBATANG,Pasia Pelangai,Ranah Pesisir,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	1402 1/TK DN/IK /XI/20 24	13- Nov-24
10	PR Sri Maningsih	Kp.Lamban,Salido ,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Basah	Risol	34%	1410 8/TK DN/IK /XI/20 24	14- Nov-24
11	PR Eka Absa	JL.LAGAN GADANG MUDIK,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sirup Buah Pala	Sirup Buah Pala	38%	1445 0/TK DN/IK /XI/20 24	18- Nov-24
12	PR Nurhayati	Jl.Pasar Surantih,Surantih, Sutura,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Nastar	Kue Nastar	38%	1444 6/TK DN/IK /XI/20 24	18- Nov-24
13	PR Otriya.S	Kampung Jirat,Kampung Baru Korong Nan Ampek,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	The Herbal Daun Gambir	The Gambir OTRIY A	40%	1444 4/TK DN/IK /XI/20 24	18- Nov-24
14	PR Reni Fitri Yenti	Jl. Padang Painan Sungai Nipah,Painan Selatan Painan,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Industri Kerupuk,K eripik,peye k dan Sejenisnya	Rakik" Dapoer Bunda Habil"	38%	1436 1/TK DN/IK /XI/20 24	18- Nov-24
15	CV Nan Tongga Agsha Pratama	PASAR BARUNG-BARUNG BALANTAI, Barung-Barung Balantai,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLA HAN GAMBIR	GKM(G etah Gambir Murni)	38%	1453 5/TK DN/IK /XI/20 24	19- Nov-24

1	2	3	4	5	6	7	8
16	PR Cici Akrima Sari	KAMPUNG ANAU,Cerocok Anau Ampang pulai,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan, Sumatera Barat	RENDANG LOKAN DAN DAGING	Randan g Takana Juo	38%	1450 4/TK DN/IK /XI/20 24	19- Nov-24
17	Misnawati	JL.LAGAN GADANG MUDIK,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sari Buah Pala	Sari Buah Pala	38%	1457 0/TK DN/IK /XI/20 24	19- Nov-24
18	PR Yuni Arpiani	APA JAYA,Kapuh,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Pancake	Pancak e	38%	1447 7/TK DN/IK /XI/20 24	19- Nov-24
19	PR Marta Desi	Lagan Gadang Mudik,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sirup Pala	Sirup Pala	38%	1469 5/TK DN/IK /XI/20 24	21- Nov-24
20	PR Wandriadi	JLN.PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR, Painan Timur Painan,Iv Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Arai Pinang	Arai Pinang	34%	1477 2/TK DN/IK /XI/20 24	21- Nov-24
21	PR WALHENDRI JAMAL PUTRA	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLA HAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1539 9/TK DN/IK /XI/20 24	29- Nov-24
22	PR Elmi Yunita	Lagan Gadang Mudik,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sirup Pala	Sirup Pala	38%	1549 7/TK DN/IK /XII/2 024	02- Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
23	PR Satria Budi Mesa Ruli	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAH AN BAHAN BAKU OBAT TRANDISIO NAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Koto	38%	1738 0/TK DN/IK /XII/2 024	03- Dec-24
24	PR Asril	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAH AN BAHAN BAKU OBAT TRANDISIO NAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1571 3/TK DN/IK /XII/2 024	04- Dec-24
25	PR BAHRUL	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAH AN BAHAN BAKU OBAT TRANDISIO NAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1599 2/TK DN/IK /XII/2 024	05- Dec-24
26	PR Pitri Yeni	Bunga Pasang III,Bunga Pasang Salido,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Basah	Kue Basah	38%	1623 7/TK DN/IK /XII/2 024	09- Dec-24
27	PR SYAFRIL	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAH AN BAHAN BAKU OBAT TRANDISIO NAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Kering	40%	1623 8/TK DN/IK /XII/2 024	09- Dec-24
28	PR Widia	Lagan Kecil Mudik,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Ikabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sirup Pala	Sirup Buah Pala	38%	1613 9/TK DN/IK /XII/2 024	09- Dec-24
29	PR Wendri Malsi	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAH AN BAHAN BAKU OBAT TRANDISIO NAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	40%	1628 4/TK DN/IK /XII/2 024	10- Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
30	PR Citrawati	Talang,Talang Koto Pulai Tapan,Ranah Ampek Hulu Tapan,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Rakik Kacang	Rakik	38%	1647 2/TK DN/IK /XII/2 024	11-Dec-24
31	PR Yuni Efrita	Jln.Kampung Talang Nanggalo,Nanggal o,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatrra Barat	Rakik	Rakik	34%	1645 0/TK DN/IK /XII/2 024	11-Dec-24
32	PR Rita Rahayu	lagan mudik,Lagan Mudik Punggasan,Lingg o Sari Baganti,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Sirup Buah Pala	Sirup Buah Pala	38%	1652 4/TK DN/IK /XII/2 024	12-Dec-24
33	PR Wira Pasla	Jln.Sikayan,Kamb ang Utara,Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	1661 9/TK DN/IK /XII/2 024	12-Dec-24
34	PR Joni Efendi	TANJUNG KANDIS,Taluk Tigo Sakato,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLA HAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1673 1/TK DN/IK /XII/2 024	13-Dec-24
35	PR Karman	KOTO KEDUDUK,Taluk Tigo Sakato,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLA HAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1669 9/TK DN/IK /XII/2 024	13-Dec-24
36	PR Alan Januari	PASA TALUAK,Taluak,B atang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLA HAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1682 8/TK DN/IK /XII/2 024	16-Dec-24
37	PR Defi Susanti	Teluk Raya,Setara Nangggalo,Koto XI Tarusan,Kabupate n Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Industri Kerupuk,K eripik,peye k dan Sejenisnya	Rakik	38%	1677 1/TK DN/IK /XII/2 024	16-Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
38	PR Nur Afriwal	Kampung Tengah,Gurun Panjang Utara,Bayang,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	1673 5/TK DN/IK /XII/2 024	16-Dec-24
39	PR Ujang Effendi	Pasar Baru Bayang,Pasar Baru,Bayang,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Industri Kerupuk,Keripik,peyek dan Sejenisnya	Rakik	38%	1677 2/TK DN/IK /XII/2 024	16-Dec-24
40	PR Gusmen Hendra	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISISONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan Kering	16%	1698 3/TK DN/IK /XII/2 024	17-Dec-24
41	PR Jafril	TANJUNG KANDIS,Taluk Tigo Sakato,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1705 0/TK DN/IK /XII/2 024	17-Dec-24
42	PR Sri Maningsih	Kp.Lamban,Salido ,IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Basah	Kue Bolu	40%	1700 4/TK DN/IK /XII/2 024	17-Dec-24
43	PR Bakhtiur	PASAR TALUAK,Taluak,Batang Kapas,Kabupaten pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1716 2/TK DN/IK /XII/2 024	18-Dec-24
44	PR Eka Exsandro	LIMPASO,Taluak, Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1717 8/TK DN/IK /XII/2 024	18-Dec-24
45	PR Gusmahariadi	UJUANG BATU,Taluak,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1722 0/TK DN/IK /XII/2 024	19-Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
46	PR Joko Harjo	Kampung Timbulun Aur Duri Surantih,Aur Duri Surantih,Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Basah	Risol	38%	1726 8/TK DN/IK /XII/2 024	19-Dec-24
47	PR Syafrizal	UJUNG BATU,Taluak,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	34%	1733 7/TK DN/IK /XII/2 024	20-Dec-24
48	PR ALMASRI	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Koto	38%	1750 1/TK DN/IK /XII/2 024	23-Dec-24
49	PR Doli Putera	MUARO PANDAN,Sungai Tunu Barat,Ranah Pesisir,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	1744 8/TK DN/IK /XII/2 024	23-Dec-24
50	PR Ibul	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Koto	38%	1743 6/TK DN/IK /XII/2 024	23-Dec-24
51	PR Nisa Fitri Rahmi	Puluik-Puluik,Puluik-Puluik,IV Nagari Bayang Utara,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	Kue Putu Ayu	Kue Putu Ayu	38%	1738 4/TK DN/IK /XII/2 024	23-Dec-24
52	PR Ali Basril	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1763 1/TK DN/IK /XII/2 024	27-Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
53	PR ASMAL HENDRI	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1763 0/TK DN/IK /XII/2 024	27-Dec-24
54	PR Yunisrel	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan Kering	28%	1761 7/TK DN/IK /XII/2 024	27-Dec-24
55	PR Ade Putra Utama	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	GETAH GAMBI R ASALAN	38%	1781 0/TK DN/IK /XII/2 024	30-Dec-24
56	PR Amril	LIMPASO,Taluak, Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1791 4/TK DN/IK /XII/2 024	30-Dec-24
57	PR Hendra Depianto	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Koto	38%	1794 5/TK DN/IK /XII/2 024	31-Dec-24
58	PR Ismael	KOTO TARATAK,Koto Taratak,Sutera,Ka bupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN BAHAN BAKU OBAT TRANDISI ONAL DARI DAUN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1800 4/TK DN/IK /X11/ 2024	31-Dec-24
59	PR Julio Ade Putra	KOTO KEDUDUK,Taluk Tigo Sakato,Batang Kapas,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	1793 9/TK DN/IK /XII/2 024	31-Dec-24

1	2	3	4	5	6	7	8
60	PR Riri Puspita Sari	Pasar Malintang, Inderapura Tengah, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	RENDANG LOKAN DAN DAGING	Rendang Lokan	38%	49/TK DN/IK /I/2025	02-Jan-25
61	PR Syafrizal	KOTO KEDUDUK, Taluk Tigo Sakato, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	46/TK DN/IK /I/2025	02-Jan-25
62	PR Londra	UJUNG BATU, Taluak, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	PENGOLAHAN GAMBIR	Getah Gambir Asalan	38%	151/T KDN/I K/I/2025	08-Jan-25
63	PR Jusmawarni	Sungai Nyalo, Sungai Nyalo IV Koto mudiek, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	192/T KDN/I K/I/2025	13-Jan-25
64	PR Yulhaini	PASAR SUNGAI TUNU, Sungai Tunu, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Air Minum Isi Ulang	Air minum isi ulang	38%	261/T KDN/I K/I/2025	22-Jan-25

Tabel 3.34
Rekapitulasi Fasilitas Legalitas Produk IKM pada tahun 2022-2024

No	Jenis Legalitasi produk	Izin yang difasilitasi tahun -		
		2022	2023	2024
1	MD-BPOM	2	0	0
2	Sertifikat Halal	4	231	0
3	Pendaftaran Merek (HKI)	15	0	0
4	Sertifikat TKDN	0	90	64
	Total Legalitas Produk	21	321	321

Tabel 3.35
Rekapitulasi Legalitas Produk IKM yang terbit pada tahun 2022-2024

No	Jenis Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan tahun -		
		2022	2023	2024
1	MD-BPOM	1	0	
2	Sertifikat Halal	4	58	
3	Pendaftaran Merek (HKI)	11	0	
4	Sertifikat TKDN	0	39	64
	Total Legalitas Produk	16	97	64

d. Pelatihan dan Pendampingan bagi Kelompok IKM (DAK Non Fisik)

Pada tahun 2024, dengan menggunakan dana DAK Non Fisik Kementerian Perindustrian RI, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah melakukan 10 (sepuluh) pelatihan dan pendampingan bagi kelompok IKM melalui program PK2SIKM DAK Non Fisik APBN Kemenperin terhadap kelompok IKM dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Rekapitulasi Pelatihan IKM yang Diselenggarakan dengan dana APBN Tahun 2024

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	2	3	4	5	6
A	Peningkatan SDM Dan Daya Saing IKM				
1	Pelatihan Teknis Produksi	47 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
2	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	47 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
3	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
4	Fasilitasi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil	150 IKM	Kab. Pesisir Selatan	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
B	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM				
1	Pelatihan Pengelola dan Operator Unit Pelayanan Teknis/Rumah Kemasan	1 Sentra	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
C	Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM				

1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	1 Sentra	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
D	Pelatihan dan Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor				
1	Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Berorientasi Ekspor	1 Sentra	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
2	Pelatihan Prosedur dan Dokumen Perdagangan Luar Negeri	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
3	Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
4	Promosi Ekspor IKM	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2024	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi



Gambar 3.23 Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2024



**Gambar 3.24 Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2023
(lanjutan)**

D. Pengawasan, Pengendalian Perizinan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Subkegiatan : Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Pagu Anggaran : Rp.26.000.000

Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi industri dilakukan untuk memberikan keterjaminan atas tersedianya data IKM yang akurat, lengkap dan terkini. Output dari kegiatan ini adalah direktori data IKM, yang digunakan nantinya sebagai pelaporan dan juga basis perencanaan kedepannya.

Tabel 3.37
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah IKM	4.971	5.037	5.303
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	13.797	14.087	14.754
3.	Nilai Investasi (Rp.000)	145.385.535.000	146.649.535.000	157.382.535.000
4.	Nilai Produksi (Rp.000)	462.181.592.000	472.058.642.000	494.346.192.000
5.	Nilai Bahan Baku (Rp.000)	253.239.031.000	259.709.611.000	273.557.961.000
6.	Omset (Rp.)	576.726.784.000	594.052.634.000	628.048.404.000

- b. Percepatan penyampaian data IKM melalui SIINas, yang mana salah satu syarat terdaftarnya IKM pada SIINas adalah legalitas IKM yaitu NIB dan IUI. Target yang diharapkan adalah terdatanya seluruh IKM pada direktori IKM Pesisir Selatan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- c. Percepatan penyampaian data SIINas melalui dana Dekonsentrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 3.38
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	
		2023	2024
1	INDUSTRI MAKANAN	1.744	1.789
2	INDUSTRI MINUMAN	146	349
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	0	0
4	INDUSTRI TEKSTIL	120	121
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	313	313
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	12	12
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	158	158
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	0	0
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	17
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	0	0
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	1391	1406
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	4
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	3
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	339	339
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	0	0
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	157	157
17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	0	0
18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	0	0
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	5	5
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	17
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	20	22
22	INDUSTRI FURNITUR	518	518
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	73	73
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	0	0
	JUMLAH	5.037	5.303

Indikator 3 : NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (ADHK)

Definisi Operasional

Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010.

Formulasi

Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) : Jumlah PDRB dari sektor Industri Pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun

Sumber Data : Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39

Capaian IKU ke 3 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	758	759,55*	100,20

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2023, terlihat bahwa capaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan lebih dari 100% dengan realisasi Nilai PDRB sebesar Rp. 759,55 Milyar pada tahun 2023, nilai ini kemungkinan akan meningkat di tahun 2024, seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca covid-19.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2022-2024 :

Tabel 3.40

Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2022, 2023, 2024

Kode	Indikator Kinerja	Nilai		
		2022	2023	2024
1	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	Rp. 741,26 M	759,55	759,55*

*data sementara (tahun 2023)

Sejalan dengan naiknya Laju Pertumbuhan PDRB sektor pengolahan, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan juga naik, dari tahun sebelumnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi gejolak ekonomi global dan nasional berhasil di sektor industri. Begitupun dengan intervensi pemerintah daerah melalui dana APBD dan dana DAK dari Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan outcome berupa nilai PDRB sektor industri pengolahan.

Di lingkup yang lebih kecil, gejolak ekonomi seperti inflasi, krisis pangan, bencana alam tidak begitu mempengaruhi sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaku usaha industri cepat bangkit dan kembali settle dan meningkatkan usaha industri mereka.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai PDRB Sektor Industri pengolahan terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	759,55*	761,87	99,69	Akan tercapai 100%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.42

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	(Rp. M)	759,55*	191.071,35*	12.301.400*

Catatan : *Data tahun 2023

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2024

2. Sumatera Barat Dalam Angka 2024

3. Berita Resmi Statistik, No. 13/02/Th. XXVII, Pertumbuhan Ekonomi Indonesi TW IV 2023

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- a. Penyebab keberhasilan capaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah :
 - Membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino, bencana alam ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca covid-19. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi (inflasi yang rendah) pada awal triwulan III tahun 2024
 - Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM melalui dana DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM dan DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM.
- b. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang lebih tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai PDRB, diantaranya :
 - Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
 - Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM serta diversifikasi produk olahan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :
 - Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 12.461.409.155, dengan realisasi sebesar Rp 12.142.367.154 Atau capaian 97,44 %
 - Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 2,56 %

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target anggaran Rp 12.435.409.155 dan realisasi sebesar Rp 12.116.542.404 Atau capaian 97,44%
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target anggaran Rp 26.000.000 dan realisasi sebesar Rp 25.824.750 atau capaian 99,33%

Lingkup pemberdayaan sektor Industri yang mendukung Nilai PDRB sama dengan Laju Pertumbuhan PDRB sektor peindustrian pada Indikator Sasaran Strategis ke -2, begitupun dengan program dan kegiatan yang mengintervensi.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	4.660.263.532	4.262.776.134	91,47
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
2	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	89.999.888	89.859.089	99,84
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	13.692.947.540	13.362.329.276	97,58
	TOTAL	18.443.210.960	17.714.964.499	96,05

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah Belanja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebesar Rp. 18.443.210.960,-. Untuk menunjang 4 (empat) Sasaran Strategis dengan realisasi sebesar Rp. 17.714.964.499,- atau 96,05 %.
- b. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas

Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 sebesar Rp. 18.443.210.960,-. Realisasi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp. 17.714.964.499,- atau 96,05 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Capaian Sasaran**

Dengan menghitung rata-rata capaian indikator tiap sasaran, hanya 1 (satu) dari 4 (empat) sasaran yang mencapai 100%, namun telah melebihi 80% untuk 2 (dua) sasaran lainnya dan satu sasaran yaitu meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, rata-rata capaian indikator masih dibawah 80%.

2. **Capaian Indikator Kinerja**

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditargetkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 100%, sedangkan 4 (empat) indikator lainnya yaitu nilai kematangan inovasi, indeks kemandirian kawasan transmigrasi, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan belum dapat mencapai target yang diharapkan.

3. **Capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah : sebesar 96,05%, artinya belanja daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 17.714.964.499 atau 96,05% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 18.443.210.960. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis rata rata sama tinggi, sedangkan sasaran startegis meningkatnya kualitas inovasi daerah tidak didukung oleh anggaran.**

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih optimal agar masing-masing entitas Dinas paham bahwa pentingnya Akuntabilitas Kinerja.
2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM ASN dan non ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi agar terciptanya Sumber Daya Manusia ASN dan non ASN yang kompeten dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di ruang lingkup kerjanya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. NURMAILISTRY, SH

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI



(Hj. NURMAILISTRY, SH)
NIP. 19670503 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET
			Sesudah
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	1 Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		2 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	4,5%
		3 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp 758 M

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah/Kabupaten	4.701.145.531	-
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	572.600.048	-
3	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	34.999.610	-
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	34.007.630	
4	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	285.056.097	-
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	12.389.402.156	-
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	32.000.000	-
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	89.999.888	-
Jumlah		18.139.210.960	

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI PESIR SELATAN



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI



(Hj. NURMAILISTRY, SH)
NIP. 19670503 199503 2 002

Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 2002 12 1 011

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	1 Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,61
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		2 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	4,5%
		3 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan(ADHK)	Rp 758 M

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah/Kabupaten	Rp. 4.660.263.532
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp. 884.675.048
3	Program Stabiisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 29.499.610
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 34.007.630
5	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 283.356.097
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 12.435.409.155
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 26.000.000
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 89.999.888
Jumlah		Rp 18.443.210.960

Painan, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 2002 12 1 011

LAMPIRAN 2 . Surat Tindak Lanjut SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dptrans@pesisirselatankab.go.id

Painan, 7 Mei 2024

Nomor : 600.4.12.3/25/DP-TRANS/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi Tahun
2023

Yth : Inspektur Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan
c.q. Irban IV

di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 700.1.2.1/714/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal sama dengan pokok diatas, maka bersama ini disampaikan dokumen tindak lanjut dimaksud, seperti daftar terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN
SEKRETARIS



Hj. NURMAILISTRY, SH
NIP. 196705031995032002

Lampiran : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023
Nomor : 600.4.12.3/25/DP-TRANS/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Progres Pelaksanaan	Koordinator	Eviden
1	Agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik. Tiap-tiap indikator kinerja, realisasi minimal sama dengan target yang telah ditetapkan	Adanya kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada DPA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi TA 2024, diharapkan monitoring terhadap evaluasi masing-masing triwulan lebih terorganisir dan terlapor dengan baik	1 (satu) dokumen DPA TA 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telaah Selesai	Sekretaris	DPA TA 2024
		Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Rasionalisasi Target pada RKT dan Perjanjian Kinerja 2024	1 (satu) dokumen RKT 2024 dan 1 (satu) dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telaah selesai	Sekretaris	RKT 2024 , PK 2024
2	Agar perbaikan/ penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dapat memberikan alternatif dari penilaian atas seluruh aksi	Penyusunan Renja 2024 didasarkan atas efektivitas pelaksanaan kegiatan	1 (satu) dokumen Renja 2024	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Telaah selesai	Sekretaris	Renja 2024
3	Agar perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja menunjukkan perbaikan setiap bulannya	Penyusunan rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan	4 (empat) dokumen rencana aksi dan 4 (empat) dokumen capaian kinerja	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Dokumen Rencana Aksi dan Capaian Kinerja TW I
4	Agar setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan lebih dari 90%. Lakukan penyebaran kuisioner ke bidang/ unit-unit untuk mendalami tingkat pemahaman, kepedulian dan komitmen	Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Penyusunan dan penyebaran kuisioner kinerja Dinas dan Perdagangan dan Transmigrasi	1 (satu) dokumen kuisioner	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksan akan	Sekretaris	-
5	Agar setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah dilaksanakan. Lakukan penyebaran kuisioner ke bidang-bidang/ unit-unit	Rapat evaluasi Per Triwulan	4 (empat) kali Rapat	1 (satu) tahun	Kepala Dinas	Dalam proses	Sekretaris	Notulen Rapat, Daftar hadir rapat
		Penyusunan dan penyebaran kuisioner	1 (satu) dokumen	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksan	Sekretaris	-

	untuk mendalami tingkat pemahaman, kepedulian dan komitmen	pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	kuisisioner			akan		
6	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Rencana Aksi disusun per sub kegiatan, sehingga pimpinan dapat memantau perencanaan dan realisasi kinerja hingga ke tingkat operasional	4 (empat) dokumen rencana aksi	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	Dokumen Rencana Aksi TW I
7	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Penyebaran kuisisioner penilaian lingkungan penilaian intern (SPIP) yang mana salah satu komponen yang dinilai adalah Komitmen terhadap kompetensi yang kemudian dirincikan : apakah telah terdapat Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan Koordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Pessel terkait penempatan/ penghapusan jabatan struktural dan fungsional	1 (satu) dokumen kuisisioner penilaian lingkungan penilaian intern	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	Dokumen Kuisisioner dan Rekapitulasi Kuisisioner SPIP
8	Pengukuran kinerja telah	SKP (Sasaran Kinerja	Dokumen	4 (empat)	Kepala	Dalam	Sekretaris	Dokumen

	mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Pegawai) telah didasarkan atas Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja	SKP ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi melalui website e-kinerja BKN	dokumen SKP	Dinas	proses		SKP TW I
9	Agar laporan kinerja menginfokan analisis apakah pada LKj telah ditemukan kecukupan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya info tentang efisiensi yang telah dilakukan	Menyusun Laporan Kinerja (AKIP) tahun 2024 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024	1 (satu) dokumen	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan	Sekretaris	
10	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan cara lakukan wawancara terhadap pegawai, sejauhmana mengetahui informasi kinerja yang ada dalam LKj sehingga menghasilkan bukti hasil wawancara/ kuesioner kepedulian pegawai	Penyusunan dan penyebaran kuisisioner kinerja Dinas dan Perdagangan dan Transmigrasi Sosialisasi Informasi Kinerja pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1 (satu) dokumen kuisisioner 2 (dua) kali Rapat	1(satu) tahun	Kepala Dinas	Akan dilaksanakan Dalam proses	Sekretaris	-
11	Agar pemantauan Capaian kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan cara melakukan analisis apakah pemantauan capaian kinerja internal telah menyajikan	Penyusunan Laporan Kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan cara Rapat evaluasi Per Triwulan Monev Kegiatan ke Lapangan	4 (empat) laporan 4 (empat) kali Rapat 4 (empat) kali	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Dalam Proses Dalam proses Dalam proses	Sekretaris Sekretaris Sekretaris	

LAMPIRAN 3. Surat Sekretaris Daerah tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Fos-eIsetda@pesisirselatankab.go.id>

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award (IGA)* yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 97 Inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

1. 93 Penerapan, 3 inisiatif dan 1 uji coba.
2. Inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui IGA adalah sebanyak 50 Inovasi,
3. Tidak menginputkan atau melaporkan inovasi daerah :
 - a. 2 Perangkat Daerah;
 - b. 3 Kecamatan dan;
 - c. 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **59,26** atau termasuk dalam Predikat **"KABUPATEN INOVATIF"**.(Rincian Terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap perjanjian kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Asrama) di UPT SMPN 7 Sutera			Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	#CINT4 PTSP KLIKIK LKPM	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
		Clik Pessel	Inovasi pelayanan publik	58	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
8.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
9.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi dan Pengembangan Aplikasi SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	94	Approve	Sangat Tinggi
10.	Dinas Perikanan dan Pangan	GEMARIKAN (GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	93	Approve	Sangat Tinggi
		FORUM KOMUNIKASI UNIT PEMBENIHAN	Inovasi pelayanan publik	63	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Cukup
11.	Dinas Kesehatan	PASAN MANDE	Inovasi pelayanan publik	91	Approve	Sangat Tinggi
		Rang Pasisie (Rangkul Angkut Pasien- Pasien Emergency)	Inovasi pelayanan publik	34	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan ≤ 70	Rendah
12.	Dinas Pertanian	DOVAC (Door To Door Vaccination Action)	Inovasi pelayanan publik	90	Approve	Tinggi
		Vanetas Durian Ponger	Inovasi Daerah lainnya sesuai	78	Tidak Terkirim	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	UPT Puskesmas Koto Baru	BAKACIPEK (Baranak KA Clek tamPEK)	Inovasi pelayanan publik	6	Kematangan ≤ 70	Sangat Rendah
16.	UPT Puskesmas Tarusan	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
17.	UPT Puskesmas Tapan	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
18.	UPT Puskesmas Asam Kumbang	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
19.	UPT Puskesmas Lumpo	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-
20.	UPT Puskesmas Tanjung Makmur	-	-	-	Tidak Melaporkan Inovasi	-

Nb:
Prediket Kematangan Inovasi:
0-30 : Sangat Rendah
31-50 : Rendah
51-70 : Cukup
71-90 : Tinggi
≥ 91 : Sangat Tinggi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LAMPIRAN 4. SK Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terkait Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 dengan parameter dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan pada 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan 100 (seratus) Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian, diperoleh Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

- 3 -

KEEMPAT : Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai acuan bagi aparat pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI,

Ir. DANTON GINTING MUNTHE, M.M.
NIP. 19650714 199403 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
5. Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dan
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDEKS PERKEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PADA 52 KAWASAN TRANSMIGRASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

NO.	NAMA KAWASAN	PROVINSI	DIMENSI	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2023			
				INDEKS DIMENSI	INDEKS KOMPOSIT	IPK-TRANS	STATUS
1.	Batu Betumpang	Bangka Belitung	Ekonomi	72.52	28.43	67.82	Mandiri
			Sosial Budaya	60.53	7.89		
			Lingkungan	62.54	4.83		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	70.55	19.96		
			Kelembagaan	57.09	6.71		
2.	Rasau Jaya	Kalimantan Barat	Ekonomi	78.24	30.67	77.72	Berdaya Saing
			Sosial Budaya	70.12	9.14		
			Lingkungan	75.00	5.80		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	81.77	23.13		
			Kelembagaan	76.34	8.98		
3.	Tobadak	Sulawesi Barat	Ekonomi	65.52	25.69	65.06	Mandiri
			Sosial Budaya	56.27	7.33		
			Lingkungan	67.04	5.18		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	67.57	19.11		
			Kelembagaan	65.83	7.74		
4.	Cahaya Baru	Kalimantan Selatan	Ekonomi	72.87	28.56	70.00	Mandiri
			Sosial Budaya	60.44	7.87		
			Lingkungan	52.46	4.05		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	80.36	22.74		
			Kelembagaan	57.62	6.78		
5.	Telang	Sumatera Selatan	Ekonomi	68.98	27.04	68.91	Mandiri
			Sosial Budaya	65.34	8.51		
			Lingkungan	76.12	5.88		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	69.83	19.75		
			Kelembagaan	65.66	7.72		
6.	Lunang Silaut	Sumatera Barat	Ekonomi	73.18	28.69	76.53	Berdaya Saing
			Sosial Budaya	86.01	11.21		
			Lingkungan	71.24	5.51		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	79.86	22.59		
			Kelembagaan	72.62	8.54		